**DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**

**BIRO PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI**

**LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI**

Nomor: ${nomor\_laporan}

1. **DASAR**
   * + - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
         2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
         3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
         4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
         5. Nota Dinas Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_no\_dinas} perihal ${perihal} dari Sdr. ${pelapor};
         6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ${no\_sprin} tanggal ${tanggal\_audit} perihal pelaksanaan Audit Investigasi.

**II. PERMASALAHAN (OBYEK DAN SASARAN AUDIT)**

1. Obyek

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri Nomor: R/ND-151/VI/2020/Ropaminal tanggal 19 Juni 2020 perihal pengaduan masyarakat dari Sdr. MUHAMMAD JAMIL tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh KOMPOL ANTHONY ADI, dkk 3 (tiga) orang selaku penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel breupa ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 dengan Pelapor a.n. Sdr. SIMON WANGDRA dan Terlapor a.n. Sdr. HERU ARTANS tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP, dimana diduga Penyidik telah tidak profesional dalam menangani perkara dimaksud, Adapun kronologis permasalahan sebagai berikut:

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana Dr SYARIFUDDIN PETANASSE, S.H., M.H. yang ternyata adalah Kuasa Hukum dari Sdr. MUSTIANI MUSNI KALAWES (Pihak Yang Sebelumnya Telah Menjual Bidang Tanah Sengketa Tersebut

Kepada …..

Kepada Sdr. HERU ARTANS Melalui Kuasanya Yakni Sdr PARLIN MUNTIR SINAGA dan Istrinya Sdri T.E. TAMBUNAN) tanpa diawali dengan Surat Dinas tentang permohonan bantuan keterangan Ahli, serta Ahli tersebut tidak dibekali dengan Surat Tugas dari Institusi atau Asosiasi yang mewadahi Profesinya, sementara telah diketahui bahwa Ahli Pidana tersebut memiliki Conflict Of Interest (Konflik Benturan Kepentingan) dalam perkara dimaksud;

Tidak meneliti secara cermat terhadap barang bukti yang dijadikan pembanding, yakni Akta Jual Beli Nomor: 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli Nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978, karena ke-3 (tiga) dokumen tersebut juga tidak tercatat/teregister pada Buku Register Pengikatan Jual Beli dan keterangan Jual Beli Tanah untuk Tahun 1977 pada Kantor Kecamatan Ilir II Palembang.

1. Sasaran:

Sasaran dalam Audit Investigasi adalah segala bentuk kegiatan dan tindakan terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}, dkk 3 (tiga) orang selaku penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel dalam menangani Laporan Polisi Nomor: ${nomor\_laporan} tanggal ${tanggal\_laporan} dengan Pelapor a.n. Sdr. ${pelapor} dan Terlapor a.n. Sdr. ${terlapor} tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP. ????

**III. PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI**

1. Tempat, waktu dan petugas
2. Tempat : Polda Sumsel ????

b. Waktu : Tanggal ${tanggal\_audit} s.d. selesai

1. Petugas : ????
2. KOMBES POL ABAS BASUNI, S.I.K., M.H. NRP 74080672 jabatan Akreditor Utama Rowabprof Divpropam Polri;
3. AKBP SUGENG KUNCORO, S.H. NRP 67060694 Jabatan Akreditor Madya Rowabprof Divpropam Polri;
4. IPDA SATRIA DWIE RAHARJA, S.H., M.H. NRP 87010249 jabatan Pamin Riksa Baggaketika Rowabprof Divpropam Polri;
5. IPDA MOCHAMMAD FADEL HARDI PUTRA, S.Tr.K. NRP 96041238 jabatan Pama Baggaketika Rowabprof Divpropam Polri;
6. BRIGADIR IMAM ACHMAD NRP 92030092 jabatan Baggaketika Rowabprof Divpropam Polri sebagai;
7. BRIPDA M. RIZKI SAHPUTRA NRP 00030228 jabatan Ba Urtu Rowabprof Divpropam Polri sebagai.

2. Kegiatan …..

2. Kegiatan Audit Investigasi:

1. Hari Selasa tanggal 23 November 2021, meliputi kegiatan:

Pukul 10.30 Wib Tim melakukan wawancara terhadap Pelapor Sdri HARTY HAMID.

1. Hari Rabu tanggal 24 November 2021

pukul 09.00 Wib Tim berangkat ke Polda Sumsel;

pukul 10.30 WIB Tim tiba di Polda Sumsel dan menghadap Kabidpropam Polda Sumsel;

pukul 11.00 Wib Tim melakukan wawancara terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel a.n. AKP NAJMUDIN, IPDA IBRAHIM AKIL, AIPDA BUDI UTAMA.

1. Hari Kamis tanggal 25 November 2021, meliputi kegiatan:

Pukul 10.00 Wib Tim melakukan wawancara klarifikasi dengan Sdr AHMAD SYAHABUDDIN, S.H., M.Si. (BPN Kota Palembang), Sdr SYAHIRULIGAMA (Kepala Kecamatan Ilir Timur II), Sdr RIZKI IRSAN (Staf Kecamatan Ilir Timur 2).

3. Hasil Audit Investigasi:

1. Berdasarkan keterangan **Sdri HARTHY HAMID (PELAPOR)** pada intinya menerangkan:

* 1. Bahwa alasan saya melaporkan Penyidik, Kanit, Kasubdit Ditreskrimum Polda Sumsel yaitu dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LBP/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA dan terlapor a.n. HERU ARTTANS dengan sangkaan “Memalsukan surat-surat dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan atau menggunakan surat palsu berupa Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 yang diketahui terjadi pada bulan Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Palembang jalan Kapten A. Rivai kota Palembang yang diduga dilakukan oleh HERU ARTTANS dkk. Terhadap Korban SIMON WANGDRA dan TJAN FEE WEN YULIANA TJANDRA, S.E. sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau 264 KUHP dan atau 266 KUHP karena penyidik telah tidak profesional dan merekayasa penyidikan berdasarkan bukti keterangan yang sejujurnya dari Pelapor/Korban SIMON WANGDRA dibawah sumpah di ruang sidang Cakra di Pengadilan Negeri Palembang pada jam 09.30 WIB pada tanggal 06 September 2019 di hadapan hakim dan ada saksi-saksi HANDY HAMID, S.H. dan M. DENI IQBAL di tempat kejadian dan keterangan saksi Pelapor/Korban tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 40 dalam putusan gugatan perkara perdata No. 13/Pid.Pra/2019/PN.Plg yang diberikan Saksi Pelapor/Korban SIMON WANGDRA sendiri yang mengaku sebagai Pengurus Gereja menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi melaporkan ke kepolisian karena merasa dirugikan nama baik dll;

b) Saksi …..

1. Saksi melaporkan ke kepolisian karena diganggu pemohon (suami saya) selama bertahun-tahun;
2. Saksi tidak tahu Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977;
3. Saksi tidak tahu Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 palsu;
4. Saksi hanya melaporkan kronologis perkaranya,tentang pencemaran nama baik dan tidak melaporkan perbuatan perkara tersebut.

Bahwa dengan demikian, sangat jelas pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP dugaan tidak pidana yang disidik oleh penyidik bukan yang dilaporkan dan tidak diakuinya Pelapor SIMON WANGDRA dan dengan demikian perkara tersebut adalah hasil rekaan atau hasil rekayasa penyidikan, dan sesungguhnya dari keterangan saksi SIMON WANGDRA maka yang dilaporkannya adalah termasuk pasal 310 KUHP atau pasal 335 ayat (2) KUHP. Dengan demikian Pelapor/Korban SIMON WANGDRA tidak tahu Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 palsu, lalu bagaimana bisa penyidik mengarahkan Pelapor SIMON WANGDRA dalam laporannya dan kemudian memaksakan hasil penyidikannya untuk diakui benar oleh Pelapor/Korban SIMON WANGDRA.

Bahwa selain itu, berdasarkan surat pernyataan saksi bernama ABDULLAH HAMID (CEK OLA), maka tindakan sewenang-wenang penyidik adalah terhadap pemeriksaan saksi yang tidak diberikan kebebasan memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang menguntungkan saya dan saksi minta diperiksa tambahan tetapi tidak dikabulkan penyidik, maka akhirnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di ruang sidang Cakra di Pengadilan Negeri Palembang pada jam 10.00 WIB pada tanggal 6 September 2019 pada pokoknya antara lain:

1. Saksi menerangkan Akta Jual Beli No, 64 tersebut ASLI.
2. Saksi pernah menemani MUSTIAN KALAWES pergi menemui Camat Dr. ISKANDAR untuk melegalisasi Akta Jual Beli No. 64 tersebut;
3. Saksi juga menemani MUSTIAN KALAWES mendaftarkan Akta Jual Beli ke Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa berdasarkan barang bukti Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 yang menurut keterangan saksi ABDULLAH HUSIN dibawah sumpah di atas yang terjadi pada tahun 2000, sedangkan suami saya membeli tanah tersebut dari MUSTIAN KALAWES melalui kuasa menjualnya PARLIN MUNTIR SINAGA terjadi pada tanggal 13 Januari 2003, berdasarkan bukti alas hak Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak No. 14 yang dibuat oleh Notaris PPAT ACHMAD SYAHRONI, S.H., maka penyidik sudah tahu Akta Jual Beli tersebut sudah ada lebih dahulu pada tahun 2000 sehingga dugaan tindak pidana memalsukan surat dan menyuruh memasukan keterangan palsu oleh suami saya pada tahun 2014 jelas sudah diketahui penyidik adalah tidak terbukti.

Bahwa …..

Bahwa kemudian perbuatan sewenang-wenang penyidik adalah penyidik **tanpa memiliki bukti pembanding asli** dan hasil uji laboratorium forensik yang sah serta tidak pernah menunjukan secara tegas dan jelas kepada suami saya (Sdr HERU ARTANS) dimana letak kepalsuan barang bukti Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 palsu tetapi langsung menjadikan suami saya menjadi tersangka dan melakukan penahanan serta mengkriminalisasi nya.

Bahwa penyidikan menetapkan Tempat dan Waktu Kejadian perkara adalah berdasarkan alat bukti putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.PLG pada bulan Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Palembang jalan Kapten A Rivai Palembang dan penyidik sudah tahu peristiwa tersebut adalah perkara gugatan perdata dan di dalam putusan suami saya telah memberikan kuasa hukum untuk mewakili suami saya sehingga suami saya tidak pernah hadir di tempat kejadian pada tahun 2014 tersebut dengan demikian tidak ada tindak pidana apapun yang suami saya lakukan sebagai Pelaku (dader) serta tidak ada satu pun alat bukti keterangan saksi fakta di tempat kejadian perkara ini dalam pemeriksaannya.

* 1. Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga suami saya membeli objek tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tersebut namun suami saya pernah mengatakan kepada saya (lupa waktunya) “mah si sinaga mau oper tanahnya ke kita” lalu karena saya sibuk dengan bisnis saya maka saya tidak begitu memikirkan soal pengoperan tanah tersebut.

Adapun pada saat pengoperan objek tanah yang berlokasi di JL MP Mangkunegara Kampung 8 Ilir Palembang sebagaimana Akta Pengoperan dan penyerahan hak Nomor 14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT ACHMAD SYAHRONI, S.H. dengan menggunakan:

* + 1. Surat Segel Jual Beli Kebun berikut tanam tumbuh antara LIE LAW KU selaku penjual kepada ABUDLLAH HUSIN selaku pembeli diketahui oleh Kepala Kamping 8 Ilir Palembang dan diregister dengan No.137/55 pada tanggal 17 September 1955;
    2. Akta Jual Beli No 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 antara ABDULLAH HUSIN dengan MUSTIAN KALAWES yang dibuat oleh PPAT Camat Ilir Timur II Palembang bernama ASNAWI DAOED;
    3. Gambar situasi Beli 429/1976 tanggal 24 Maret 1976 yang dibuat berdasarkan PETA Kota Palembang seluas 4055 M2;
    4. Surat Ukur No 2889/8 Ilir/2000 pada tanggal 19 Desember 2000 seluas 4055 M2 dengan NIB: 04.01.02.19.03329 untuk mengganti gambar situasi No. 429/1976 seluas 4055 M2.
  1. Bahwa saya tidak mengetahui apakah pada saat objek tanah sesuai Akta Jual Beli No. 64/VII/4/IT-II/1977 tersebut suami saya beli dari Sdr PARLIN MUNTIR SINAGA sebelumnya dicek terlebih dahulu surat-suratnya karena pada saat itu saya tidak ikut dalam jual beli tersebut dan suami saya a.n. HERU ARTANS (Alm) tidak pernah mengatakan kepada saya.

4) Bahwa …..

* 1. Bahwa setahu saya pada saat suami saya membeli objek tanah sesuai Akta Jual Beli No. 64/VII/4/IT-II/1977 tersebut Sdr PARLIN MUNTIR SINAGA tidak pernah mengatakan kalau objek tanah tersebut bersengketa namun pada saat suami saya akan membangun warung untuk penjaga tanah tersebut sekira akhir tahun 2003 (lupa tanggal dan bulannya) kemudian beberapa bulan setelah membeli objek tanah (tidak tahu pastinya) kemudian Sdr PARLIN MUNTIR melaporkan kepada suami saya bahwa objek tanah tersebut telah diserobot dan diduduki oleh Oknum TNI Mayor ISMI HARUN, dkk. dimana saat itu Sdr PARLIN MUNTIR SINAGA juga sempat mengatakan kepada suami saya a.n. HERU ARTANS (Alm) dan saya bahwa objek tanah tersebut juga sudah berperkara sebagai berikut:
     + - 1. Gugatan di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Nomor: 65/PDT.G/2002.PN.PLG tanggal 2 September 2002 antara Sdri TE TAMBUNAN (Penggugat) dengan Sdr M HARUN Bin ZEIN (tergugat) dengan hasil intinya menyatakan bahwa tanah seluas 4.055 M2 yang terletak di jalan Mp Mangkunegara Rt/Rw 40/11 Kel 8 Ilir Kec Ilir Timur II Palembang mempunyai alas hak yaitu:
     1. Surat Jual Beli Kebun tanggal 17 September 1955 yang diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir Palembang Reg. 137/55;
     2. GS No. 429/1976 tanggal 24 Maret 1976;
     3. Surat Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT.II.1977;
     4. Surat Keterangan dari Kelurahan 8 Ilir Palembang tanggal 4 Agustus 1997 No. 32/5B/1004/1997 diketahui Camat Ilir Timur II Palembang tanggal 5 Agustus 1997 No. 188/Ket/06/1997;
     5. Surat Ukur No. 2889/8 Ilir/2000 tanggal 19 Desember 2000;
     6. Akta Jual Beli dan Pengoperan No. 162 tanggal 23 April 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Rober Tjahja Indra, S.H., M.Ba.

Adapun terhadap alas hak sebagaimana angka 1) s.d. 6) diatas adalah milik penggugat yang sah a.n. Sdri TE TAMBUNAN.

* + - * 1. Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Sumsel a.n. Sdr HARUN Bin ZEIN (Pembanding/tergugat) terhadap Sdri TE TAMBUNAN (Terbanding/Penggugat) sebagaimana Putusan Nomor: 121/PUT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002 dengan hasil intinya menyatakan bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumsel Nomor: 65/PDT.G/2002.PN.PLG tanggal 2 September 2002 dan menyatakan jual beli yang dilakukan antara Sdr MUSTIAN KALAWES dengan ABDULLAH HUSIN sesuai AJB 64/VIII/4/IT.II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tidak pernah ada;
        2. Upaya Hukum Banding di Mahkamah Agung a.n. Sdri TE TAMBUNAN terhadap Sdr M HARUN Bin ZEIN sebagaimana Putusan Nomor: 1218 K/PDT/2003 tanggal 21 Maret 2005 yang intinya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 121/PUT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002.

Adapun …..

Adapun karena sudah terlanjur terjadinya Jual Beli maka kami meminta pertanggungjawaban kepada penjual a.n. Sdr PARLIN MUNTIR SINAGA terkait dengan sengketa ini.

* 1. Bahwa suami saksi a.n. HERU ARTANS (Alm) ada melakukan upaya hukum dengan membuat gugatan ke BPN dengan Nomor: 90/PDT.G/2014/PN.PLG dengan hasil kurang cukup bukti (Neit Ontvankelijke Verkelaard) dan dilanjutkan dengan Banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2015/PT. PLG tanggal 28 Oktober 2015 yang mengabulkan Gugatan alm HERU ARTTANS untuk keseluruhannya dan menyatakan Alm Sdr HERU ARTANS sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 14 tanggal 13 Januari 2003 dan menyatakan bahwa SHM No 1506/R, Gambar Situasi No 2155 tahun 1979 degan luas 3990 M2 a.n. H.M. HARUN bin R. M. ZEN harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Putusan tersebut sudah inkrah di buktikan dengan surat inkrah dari pengadilan Negeri Palembang Nomor: W6.U1/3067/Pdt.02/XII/ 2015 tanggal 31 Desember 2015;
  2. Bahwa alasan suami saya a.n. HERU ARTANS (Alm) dan saya melakukan gugatan perdata terhadap BPN RI dan BPN Kota Palembang di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Nomor: 90/PDT.G/2014/PN.PLG tanggal 11 November 2014 tersebut karena BPN menolak pengajuan pembuatan sertifikat yang kami ajukan dengan alasan tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat lain yang mana pada saat pembuktian di pengadilan BPN mengeluarkan sertifikat atas nama TJAN FEE WEN atau YULIANA TJANDRA (istri dari Simon Wangdra) yang ternyata setelah diteliti oleh pihak kami bersama kuasa hukum, luas tanah yang tercantum 3990 m2 di sertifikat tersebut tidak sesuai dengan objek tanah kami 4055 m2 dan alamat nya pun tidak sesuai dengan objek tersebut. Di dalam GS No.2155/1979 milik TJAN FEE WEN YULIANA TJANDRA, SE dibuat berdasarkan PETA KENTEN sedangkan GS No.429/1976 milik alm HERU ARTTANS dibuat berdasarkan PETA KOTA PALEMBANG. Untuk lokasi yang diduduki oleh SIMON WANGDRA itu masuk PETA KOTA PALEMBANG.

Adapun isi dari putusan tersebut yang intinya menerangkan bahwa hakim menolak permohonan pemohon karena dipandang cacat formil yakni kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Untuk perkara di PN ini yang di tetapkan hakim secara NO, kami ajukan banding ke pengadilan tinggi dengan melampirkan bukti-bukti asli kepemilikan dan kami dinyatakan menang oleh pengadilan tinggi. Untuk kemenangan ini, pihak BPN pertama mengajukan Kasasi, tetapi setelah 2 minggu kemudian kasasi tersebut mereka cabut dan putusan PT ini dinyatakan Inkrah oleh Pengadilan Negeri (Sdr. Heru Arttans sebagai pemilik SAH dari tanah tersebut).

7) Bahwa …..

* 1. Bahwa setelah saya mendapatkan hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Nomor: 90/PDT.G/2014/ PN.PLG tanggal 11 November 2014 yang intinya berisi hakim menolak permohonan pemohon karena dipandang cacat formil yakni kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verkelaard) tersebut lalu kami melakukan upaya hukum banding dan dinyatakan menang oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 26 Oktober 2015 dengan hasil intinya menerangkan bahwa Hakim berpendapat membatalkan SHM Nomor 1506 milik M. HARUN Bin M. ZEN dan menyatakan Sah Akta Pengoperan no 14 tanggal 13 Januari 2003 antara Sdr MUSTIAN KALAWES (dengan kuasa Parlin Muntir Sinaga) kepada Sdr HERU ARTTANS di hadapan Notaris Achmad Syahroni. Adapun terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 26 Oktober 2015 tersebut oleh Pengadilan Negeri sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor: W6.U1/3067/Pdt.02/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
  2. Ya, pernah diajukan gugatan Praperadilan No. 13/Pid.Pra/2019/ PN.Plg tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Negeri Palembang oleh kuasa hukum HANDY HAMID, S.H. (alm) dan isi putusannya permohonan gugatan saya tidak dikabulkan namun dalam putusan ada keterangan saksi Pelapor atau Korban SIMON WANGDRA dibawah sumpah di hadapan Hakim Persidangan pada tanggal 06 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi melaporkan ke kepolisian karena merasa dirugikan nama baik dll;

Saksi melaporkan ke kepolisian karena diganggu HERU ARTTANS karena mendapat surat somasi, WA, dan Koran selama bertahun-tahun;

Saksi tidak tahu Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977;

Saksi tidak tahu Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 palsu;

Saksi hanya melaporkan kronologis perkaranya dan tidak melaporkan perbuatan perkara tersebut.

Bahwa jadi yang diakui dan dilaporkan Pelapor/Korban SIMON WANGDRA sebenarnya adalah terkait pasal 310 dan 335 ayat (2) KUHP dan bukan pasal yang disidik oleh Penyidik tersebut saat ini.

* 1. Bahwa Sdr. HERU ARTTANS ditahan pada tanggal 19 Juli 2019 sampai 19 Agustus 2019 untuk selama 33 (tiga puluh tiga) hari dan alasan penyidik mengeluarkan dari tahanan menurut alasan Kompol ANTONI ADHI, SH. bahwa Direksrimum mendapat Hidayah lalu melepaskan sdr. HERU ARTTANS dan surat permohonan penangguhan yang pernah diajukan dan diterima Penyidik masih berlaku dan lalu secepatnya dibuat berita acaranya.
  2. Menurut saya penangkapan dan penahanan tersebut benar-benar melanggar Hak Asasi suami saya dan terlihat nyata bahwa suami

saya …..

saya di kriminalisasi. Atas penahanan suami saya tersebut, saya berupaya untuk mendapatkan penjelasan atas penahanan terebut kepada Dirreskrimum Polda Sumsel a.n. KOMBES POL YUSTAN maupun Kanit saat itu (KOMPOL PURN ANTONI) tapi ia selalu menghindar. Dan jawaban penyidik maupun Dirreskrimum Polda Sumsel atas penahanan suami saya karena mereka anggap suami saya tidak Koperatif dan dalam hal ini pihak penyidik tidak pernah bisa memberikan pembanding untuk AKTA 64/VIII/4/IT-II/1977 yang mereka katakan palsu.

Adapun setelah suami saya di tangguhkan penahanannya setelah operasi ginjalnya penyidik ada beberapa kali datang ke rumah saya di Jakarta dengan tujuan untuk melakukan penjemputan untuk diserahkan ke Jaksa kepada suami saya dimana saat itu suami saya masih terbaring lemah masih menggunakan alat bantu Drainer (alat untuk mengeluarkan darah di perutnya) dan tidak bisa untuk diserahkan Kejaksa saat itu hingga akhirnya suami saya meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020.

* 1. Suami saya meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya yaitu Kanker Ginjal yang sudah ber-metastasis dimana penyakit tersebut baru diketahui pada bulan Desember 2019 saat setelah Alm Suami a.n. HERU ARTANS ditangguhkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel.
  2. Saya tidak melihat secara langsung saksi ahli yang dihadirkan yang saya ketahui DR.SYARIFFUDDIN PETTANASE pakar hokum pidana yang merangkap sebagai pengacara MUSTIAN KALAWES yang mana kesaksiannya kami ragukan kami tolak karena saudara DR.SYARIFFUDDIN PETTANASE beberapa tahun lalu pernah kekantor kami membawa misi dari MUSTIAN KALAWES dan mengatakan Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 adalah benar, sedangkan kesaksiannya di POLDA bertolak belakang maka dari itulah kami tolak kesaksiannya.
  3. Menurut penyidik Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 itu palsu karena tidak tercatat di buku pengikatan jual beli yang mana menurut saya bahwasannya secara hukum tidak tercatat satu akta bukan berarti palsu karena bisa jadi itu sebuah kelalaian. Sedangkan untuk menyatakan Akta tersebut palsu harus ada pembanding yang mana pembanding tersebut sudah pernah saya minta dan tanyakan kepada DIRESKRIMUN POLDA tetapi mereka jawab tidak ada. Bukankah untuk menyatakan palsunya sebuah Akta harus melalui proses pembanding dan LABKRIM.
  4. Bahwa awalnya pada tahun 1955 Sdri LIE LAW KU menjual objek tanah tersebut kepada Sdr ABDULLAH HUSEIN dengan alas hak Surat Jual Beli Kebun tanggal 17 September 1955 yang diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir Palembang Reg. 137/55 kemudian Sdr ABDULLAH HUSEIN membuat objek tanah tersebut agar terdaftar

dengan …..

dengan mengurus Gambar Situasi No. 429/1976 tanggal 24 Maret 1976, Surat Keterangan dari Kelurahan 8 Ilir Palembang tanggal 4 Agustus 1997 No. 32/5B/1004/1997 diketahui Camat Ilir Timur II Palembang tanggal 5 Agustus 1997 No. 188/Ket/06/1997, Surat Ukur No. 2889/8 Ilir/2000 tanggal 19 Desember 2000 lalu pada tanggal 8 Agustus 1977 ABDULLAH HUSEIN menjual tanah tersebut kepada Sdr MUSTIAN KALAWES sebagaimana Akta Jual Beli No 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 kemudian pada tanggal 13 Januari 2003 objek tanah tersebut suami saya beli dari Sdr PARLIN MUNTIR (kuasa jual Sdr MUSTIAN KALAWES) dengan cara pengoperan hak sesuai Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 14 tanggal 13 Januari 2003 dihadapan Notaris/PPAT ACHMAD SYAHRONI, S.H.

b. Berdasarkan keterangan **AKP** **NAJMUDIN, S.H.,** NRP 74090181, Jabatan Kasatreskrim Polres Pagar Alam, pada Intinya menerangkan:

Bahwa benar saya ditunjuk untuk menangani berdasarkan disposisi dari Kanit KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. dan IPTU NAJAMUDIN, S.H. sebagai penyidik pembantu untuk menangani Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS tentang dugaan tindak pidana memalsukan surat- surat dan atau mengunakan surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP.

Bahwa Kronologis/Peristiwa Tindak Pidana secara singkat atas adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS sebagai berikut:

Awalnya terjadi tindak pidana memalsukan surat-surat dan atau mengunakan Surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik yang diduga dilakukan oleh HERRU ARTTANS, terhadap korban SIMON WANGDRA yang terjadi pada bulan Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A Rivai Palembang dengan cara pelaku Sdr HERRU ARTANS mengunakan akta jual beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 18 Agustus 1977 untuk menggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG Putusan Nomor: 90/Pdt.G/2014/PN.Plg, 11 November 2014 dan putusan Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2015 isi gugatan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen haruslah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya yang mana sertifikat tersebut merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh Korban SIMON WANGDRA dan mengugat putusan NO.65/PDT.G/2002/PN.PLG, tanggal 2 September 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang NO.121/PDT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005

Mengenai …..

Menegenai Keberatan ad 4: Keberatan ini tidak di benarkan oleh karena pengandilan tinggi telah benar dalam pertimbangan hukumnya karna jual beli atas nama Mustian KS tidak pernah ada, yang mana pada saat ini terlapor HERRU ATTANS, tidak menyerahkan surat asli akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tgl 18 Agustus 1977, yang merupakan barang bukti dalam parkara yang di persangkahkan.

Legal standing/bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1506/R atas nama TJAN FEE WEN ALIAS JULIANA TJANDRA, S.E.

Bahwa Surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dimana Akta Jual Beli tersebut sudah di nyatakan dalam Putusan NO.65/PDT.G/2002/ PN.PLG tanggal 2 September 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang NO.121/PDT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005 yang intinya menyatakan Menegenai Keberatan ad 4: Keberatan ini tidak di benarkan oleh karena pengandilan tinggi telah benar dalam pertimbangan hukumnya karna jual beli atas nama Sdr MUSTIAN KALAWES tidak pernah ada. Kemudian pada tanggal 11 November 2014 Sdr HERU ARTANS mengajukan gugatan terhadap BPN RI dan BPN Provinsi Sumsel ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai Putusan Nomor: 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 November 2014 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai Putusan Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 menggunakan dasar Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 yang sudah jelas dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak pernah terjadi jual beli a.n. MUSTIAN KALAWES. Kemudian dengan gugatan yang dibuat Sdr HERU ARTANS kepada BPN RI dan BPN Provinsi Sumsel tersebut mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen (yang telah dijual kepada Sdr TJAN FEE WEN) dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa alasan penyidik menduga Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tersebut palsu karena setelah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan kami temukan berdasarkan keterangan Lurah 8 Ilir Kec Ilir Timur II Palembang a.n. R. MANTERI HAMID pada BAP 1 Agustus 2019 poin 7 dan 8 intinya menerangkan bahwa sesuai data arsip di Kel 8 Ilir Kec Ilir TImur II Palembang yang saat itu dijabat oleh Lurah R. MANTERI HAMID periode tahun 1976 s.d. 1979 tidak ada data Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 di dalam arsip Kelurahan dan berdasarkan keterangan Camat pada BAP tanggal 10 Agustus 2018 poin 6 intinya menerangkan bahwa Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 antara ABDULLAH HUSEIN dijual kepada MUSTIAN KALAWES tidak terdaftar dalam buku registrasi Akta Jual Beli tahun 1977 yang dilekuarkan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang.

Adapun …..

Adapun selain tidak teregister di Kantor Kecamatan Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tersebut setelah kami lakukan penyitaan terhadap akta jual beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 yang dijadikan bukti pembanding lalu kami analisa ternyata terdapat perbedaan antara Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dengan Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 (bukti pembanding) dimana perbedaannya yaitu pada Kop, Cap Stempel, dan nama Lurah yang menjabat pada waktu itu.

Bahwa perbedaan terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dengan Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 (bukti pembanding) sebagai berikut:

1. Blangko keseluruhan berbeda;
2. Cap pejabat pembuat akta tanah / camat Ilir Timur II (AJB 64) sedangkan Cap asisten wedana Ilir Timur II (AJB 438 / pembanding);
3. Camat a.n. ASNAWI DAOED NIP 440000146 nya sama namun Cap Stempelnya berbeda;
4. Lurah a.n. ACHMAD ZAINURI (AJB 64) sedangkan Lurah a.n. HERMANTRY HAMID (AJB 438 / pembanding).

Adapun pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Camat Ilir Timur II a.n. Drs SYAHRULIGAMA pada tanggal 10 Agustus 2018 sempat ditanyakan terkait dengan Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dan dijawab bahwa sampai dengan saat ini terhadap AJB tersebut tidak terdaftar dalam buku registrasi Akta Jual Beli tahun 1977 yang dikeluarkan kantor Camat Ilir Timur II.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. dan dipaparkan oleh IPTU NAJMUDIN, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. AKBP KHUDRI M. (Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumsel);
2. AKBP JOKO S (Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumsel);
3. KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. (Kanit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel);
4. BRIPKA KGS BUDI UTAMA, S.H. (Banit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel);
5. BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H. (Banit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel);
6. BRIPDA RUTH DEBORA S (Banit 2 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel).

Kesimpulan:

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP.

Rekomendasi …..

Rekomendasi:

1. Dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;
2. Lengkapi mindik;
3. Buat LHP;
4. Kirimkan SP2HP.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 ada Supervisi yang dilakukan oleh Birowassidik Bareskrim Polri terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 yang kemudian dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh KOMBES POL Drs JEBUL SANTOSO JATMIKO, M.Hum dan dipaparkan oleh IPDA IBRAHIM AKIL (saya) dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. KOMBES POL WIBOWO;
2. KOMBES POL WAWAN M;
3. AKBP FAISOL MAJID;
4. AKBP YUDI S.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam supervise, telah dinaikan penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 dan ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana memalsukan surat-surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Rekomendasi:

1. Agar penyidik membuat Surat Perintah Membawa;
2. Panggil tersangka.

Setelah itu pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. (Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Sumsel) dan dipaparkan oleh IPTU NAJMUDIN, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. AKBP JOKO S;
2. KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H.;
3. BRIPKA KGS BUDI UTAMA, S.H.;
4. BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H.

Kesimpulan:

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP berdasarkan 2 (dua) alat bukti cukup yaitu keterangan saksi dan petunjuk dan terhadap terlapor dapat di panggil tersangka.

Rekomendasi:

1. Terhadap terlapor dapat dipanggil tersangka;
2. Lengkapi mindik;
3. Kirimkan SP2HP.

Bahwa …..

Bahwa pada tanggal 2 November 2021 penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. dan dipaparkan oleh IPDA IBRAHIM AKIL, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

* 1. AKBP PARLINDUNGAN;
  2. AKP WILLU OSCAR, S.E.;
  3. AIPDA KGS BUDI UTAMA, S.H.;
  4. BRIPKA OBRIEN CANDRA, S.H.;
  5. BRIGADIR AZMI CAHYADI, S.H.

Kesimpulan:

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP, bisa dihentikan karena tersangka telah meninggal dunia sesuai pasal 77 KUHP.

Rekomendasi:

1. Buat administrasi penghentian penyidikan;
2. Kirimkan SP2HP ke pihak Korban.

Bahwa alasan kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli yaitu karena setelah kami melakukan kordinasi dengan JPU pada bulan Juni 2019 (lupa pastinya) Bahwa JPU a.n. EDY menyampaikan bahwa agar penyidik berkordinasi dengan ahli apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan menurut kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli juga diatur dalam pasal 120 ayat 1 KUHAP “*DALAM HAL PENYIDIK MENGANGGAP PERLU, IA DAPAT MEMINTA PENDAPAT ORANG AHLI ATAU ORANG YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS*”. Dasar itu yang dijadikan acuan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan AHLI.

Adapun ahli a.n. Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H tersebut ditunjuk oleh Universitas Sriwijaya setelah penyidik mengirimkan Surat permintaan keterangan AHLI berdasarkan surat Nomor: Ban/406/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H. bahwa ia termasuk salah satu Ahli Pidana dari Universitas Sriwijaya yang memiliki Sertifikat Pendidik Nomor: 08100909827 yang lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional serta ia sering dimintai keterangan oleh penyidik untuk mencari titik terang dalam menangani suatu perkara.

Bahwa penyidik tidak tahu kalau Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H. merupakan pihak atau kuasa hukum dari Sdr MUSTIANI MUSNI KALAWES karena Penyidik tidak diberitahu dan menurut penyidik pernyataan yang diberikan oleh ahli tersebut memberikan keterangan yang objektif dan tidak memihak Terlapor yang merupakan Kuasa Hukum pemilik awal Akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 8 Agustus 1977 yang kemudian dijual

kepada …..

kepada Terlapor HERU ARTANS, dimana dalam keterangan ahli tersebut pada BAP tanggal 29 Juli 2019 menyatakan bahwa apabila Akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 8 Agustus 1977 tidak teregister pada buku register Akta Jual Beli pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II tahun 1977 maka akta tersebut dianggap tidak benar atau palsu dan di dalam Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Jual Beli antara ABDULLAH HUSEIN dengan MUSTIAN KALAWES tidak pernah ada artinya surat atau akta tersebut tidak sah.

Dengan surat perintah penyitaan Nomor: SPRIN-TA/123/V/2019/ Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2019 telah dilakukan penyitaan berupa:

* 1 (Satu) Arsip buku registrasi Akta Jual Beli tahun 1977 yang di keluarkan kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang;

* 1 (satu) Examplar surat akta jual beli No. 438 tahun 1977 yang di keluarkan oleh kantor kecamatan ilir Timur II;

* 1 (satu) Examplar surat akta jual beli No. 320 tahun 1976 yang di keluarkan oleh kantor kecamatan ilir Timur II;
* 1 (satu) Examplar surat akta Pelepasan Hak No. 645 tahun 1978 yang di keluarkan oleh kantor kecamatan ilir Timur II;

Dan telah dibuatkan BA. Penyitaannya dan telah mendapatkan Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 931/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 31 Mei 2019.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/146/VI/2019/Ditresrimum, tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan penyitaan berupa:

* 1 (satu) Examplar Copy Legalisir surat akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 8 Agustus 1977 dan telah dibuatkan BA. Penyitaannya telah mendapatkan Penetapan penyitaan dari pengadilan negeri Palembang Nomor: 1060/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 03 Juli 2019.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/177/VII /2019/ Ditreskrimum, tanggal 3 Juli 2019 telah dilakukan penyitaan berupa:

* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 90/Pdt.G/2014/PN.Plg, 11 November 2014;
* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG Pada hari senin tanggal 26 oktober 2015. dan telah dibuatkan BA. Penyitaannya telah mendapatkan Penetapan penyitaan dari pengadilan negeri Palembang Nomor: 1188/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 25 Juli 2019.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/176/VII /2019/Ditresrimum, tanggal 23 Juli 2019 telah dilakukan penyitaan berupa:

* Putusan No.65/Pdt.G/2002/PN.PLG, tanggal 02 September 2002;
* Putusan pengadilan tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT.PLG, tanggal 27 November 2002;

Putusan …..

* Putusan kasasi Mahkama Agung Ro. No.1218 K/pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005. dan telah dibuatkan BA. Penyitaannya telah mendapatkan Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1204/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 29 Juli 2019.

Penyidik tidak melakukan uji Laboratorium Forensik terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977, karena Sdr. HERU ARTTANS tidak memberikan/menyerahkan Akta Aslinya.

Bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 tersebut kami lakukan penyitaan dari Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang kami meminta nya dari PNS RIZKI IRSAN (staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang) dimana kami meminta contoh AJB yang dikeluarkan pada tahun 1976, 1977, dan 1978 sebagai bukti pembanding terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 namun saat itu kami tidak mengecek apakah bukti pembanding yang diberikan tersebut terregister juga di Buku Register di Kecamatan karena kami menganggap contoh AJB yang diberikan PNS RIZKI IRSAN (staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang) tersebut sudah benar.

Bahwa setelah diperlihatkan buku register dari Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tahun 1977 tersebut ditemukan bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 yang dijadikan bukti pembanding tidak terregister pada buku register Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tahun 1977 dan alasan saya pada saat itu tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap AJB yang dijadikan bukti pembanding tersebut karena saat itu bukti pembanding diambil dari staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang a.n. PNS RIZKI IRSAN jadi saya menganggap terhadap surat yang diberikan tersebut sudah benar sesuai ketentuan di Kecamatan namun ternyata setelah pemeriksa memperlihatkan buku Register Akta Jual Beli pada tahun 1977 tidak ada tercatat Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 dan saya juga belum pernah bertanya kepada pihak Kecamatan mengapa bukti pembanding yang diberikan tersebut tidak teregister pada buku register Akta Jual Beli tahun 1977.

Penyidik sudah mendalami objek tanah sebagaimana AJB No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 bahwa pemilik awalnya ABDULLAH HUSEN kemudian dijualkan kepada MUSTIAN KALAWES, selanjutnya MUSTIAN KALAWES memberikan kuasa untuk menjualkan bidang tanah tersebut kepada PARLIN MUNTIR SINAGA berdasarkan surat kuasa menjual Nomor: 18 tanggal 18 Oktober 2000. Kemudian surat kuasa tersebut dibatalkan oleh MUSTIAN KALAWES pada tanggal 9 Agustus 2002. Kemudian PARLIN MUNTIR SINAGA menjualkan bidang tanah tersebut kepada HERU ARTTANS sesuai akta pengoperan Hak nomor 14 tanggal 13 januari 2003.

Untuk …..

Untuk SHM 1506/R a.n. M. HARUN ZEN telah terdaftar di kantor Pertanahan Kota Palembang kemudian dijualkan kepada TJAN FEE WEN JULIANA TJANDRA, SE berdasarkan akta jual beli Nomor: 119/IT.II/2012 tanggal 12 November 2012, kemudian SHM tersebut sudah dijadikan Warkah dengan dipecah menjadi 14 SHM sebagai berikut:

1. SHM Nomor: 12379/ 8 Ilir, SU No 201 tanggal 2 Desember 2013;
2. SHM Nomor: 12380/ 8 Ilir, SU No 202 tanggal 2 Desember 2013;
3. SHM Nomor: 12381/ 8 Ilir, SU No 203 tanggal 2 Desember 2013;
4. SHM Nomor: 12382/ 8 Ilir, SU No 204 tanggal 2 Desember 2013;
5. SHM Nomor: 12383/ 8 Ilir, SU No 205 tanggal 2 Desember 2013;
6. SHM Nomor: 12389/ 8 Ilir, SU No 211 tanggal 12 Desember 2013;
7. SHM Nomor: 12390/ 8 Ilir, SU No 212 tanggal 12 Desember 2013;
8. SHM Nomor: 12391/ 8 Ilir, SU No 213 tanggal 12 Desember 2013;
9. SHM Nomor: 12392/ 8 Ilir, SU No 214 tanggal 12 Desember 2013;
10. SHM Nomor: 12393/ 8 Ilir, SU No 215 tanggal 12 Desember 2013;
11. SHM Nomor: 12394/ 8 Ilir, SU No 216 tanggal 12 Desember 2013;
12. SHM Nomor: 12395/ 8 Ilir, SU No 217 tanggal 12 Desember 2013;
13. SHM Nomor: 12396/ 8 Ilir, SU No 218 tanggal 12 Desember 2013;
14. SHM Nomor: 12397/ 8 Ilir, SU No 219 tanggal 12 Desember 2013;
15. SHM Nomor: 12398/ 8 Ilir, SU No 220 tanggal 12 Desember 2013.

Untuk mentukan siapa yang paling berhak atas kepemilikan objek tanah bukan wewenang dari penyidik.

Bahwa Tersangka a.n. HERU ARTTANS dilakukan penahanan pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN.Han/69/VII/ 2019/Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2019 dan telah dibuatkan Berita acara Penahanan pada tanggal 19 Juli 2019 namun saat itu Sdr HERU ARTANS tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut lalu penyidik membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Surat Perintah Penahanan tersebut. Lalu Sdri HARTY HAMID mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan pada tanggal 22 Juli 2019 namun untuk suratnya saat ini belum ditemukan dan akan saya cari dan apabila ditemukan akan saya serahkan kepada pemeriksa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 Tersangka HERU ARTTANS ditangguhkan penahanan nya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sprin-Han/69.c/VIII/2019/ Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019.

Bahwa upaya penyidik menyerahkan tersangka ke JPU (tahap II) sebagai berikut:

a. Pada …..

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 mengirimkan Surat Pemanggilan ke-I terhadap HERU ARTTANS dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/37/I/2020/Ditreskrimum tanggal 8 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti ke JPU (Tahap II), namun tidak hadir;
2. Pada tanggal 21 Januari mengirimkan Surat Pemanggilan Ke-II terhadap HERU ARTTANS dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/37.a/I/2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti ke JPU (Tahap II), namun tidak hadir;
3. Melakukan pemanggilan Ke-III terhadap HERU ARTTANS dengan surat panggilan nomor :Sp.gil/37.b/I/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti, namun juga tidak hadir dengan alasan sakit namun tidak disertai dengan hasil rekam medis dari dokter;
4. Berupaya menjemput Tersangka HERU ARTANS di French Walk Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai Surat Perintah Membawa Nomor: Sp.gil/37.c/II/2020/Ditreskrimum tanggal 13 Februari 2020, namun tersangka HERU ARTTANS sedang sakit dan mendapatkan pengobatan Rawat Jalan (baru diberikan surat rekam medik), sehingga Penyidik **MENGAMBIL KEBIJAKAN** untuk tidak membawa tersangka HERU ARTTANS ke Palembang untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II), kemudian Istri Tersangka HERU ARTTANS a.n. HARTY HAMID, S.H. Membuat Surat Pernyataan akan menghadirkan Sdr HERU ARTTANS ke Palembang apabila sudah sembuh;
5. Pada tanggal 11 Agustus 2020 penyidik berupaya menjemput Tersangka HERU ARTANS dengan membawa Dokter RS Bhayangkara a.n. MANSURI di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara namun penyidik melihat kondisi HERU ARTTANS masih dalam keadaan sakit dan Dokter RS Bhayangkara a.n. MANSURI menyatakan bahwa terhadap HERU ARTTANS belum bisa dibawa untuk diserahkan ke JPU (tahap II) karena keadaan Tersangka masih sakit kemudian penyidik mengambil Kebijakan untuk tidak membawa.

Kemudian pada bulan Februari 2021 (lupa tanggalnya) Sdri HARTY HAMID (istri HERU ARTTANS) datang ke Unit I Subdit III menemui KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. memberikan penjelasan jika Sdr. HERU ARTTANS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020, namun surat keterangan meninggal dunia belum diberikan.

Bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman terkait dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Oktober 2018 yang intinya membatalkan SHM 1506/R a.n. M. HARUN ZEN dimana setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap BPN a.n AHMAD SYAHABUDDIN pada tanggal 8 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa terhadap SHM 1506/R a.n. M. HARUN ZEN tersebut belum ada pembatalan karena masih ada

gugatan …..

gugatan perlawanan dari Sdri TJAN FEE WEN di register Nomor: 186/PDT.PLW/2016/PN.PLG dan gugatan perdata Nomor 105/PDT.G/2019/PN.PLG kemudian berdasarkan keterangan ahli bahwa apabila belum ada pembatalan oleh BPN maka SHM 1506/R a.n. M. HARUN ZEN masih sah.

Bahwa penyidik ada dilakukan gugatan Pra Peradilan oleh Sdr HERU ARTANS sebagaimana Putusan Pra Peradilan Nomor: 13/Pid.Pra/2019/PN Plg tanggal 19 Agustus 2019 dimana Sdr HERU ARTANS menggugat Ditreskrimum Polda Sumsel atas Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Sdr HERU ARTANS atas penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 dengan Pelapor a.n. Sdr. SIMON WANGDRA dan Terlapor a.n. HERU ARTTANS terkait dugaan tindak pidana memalsukan surat-surat dan atau mengunakan surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP yang menurutnya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Oktober 2018. Adapun hasil dari persidangan Pra Peradilan tersebut Hakim memutuskan menolak gugatan Sdr HERU ARTANS karena menurut Hakim Ditreskrimum Polda Sumsel telah benar dalam menetapkan tersangka berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah berupa AJB No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 yang tidak teregister di Kecamatan Ilir Timur II, alat bukti Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018, dan keterangan AHLI Sdr Dr. H. PETTANASE, S.H., M.H. serta bukti petunjuk yang bersesuaian antara keterangan alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

c. Berdasarkan keterangan **IPDA** **IBRAHIM AKIL, S.H.** NRP 87080681, Jabatan Ps Panit I Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel, pada Intinya menerangkan:

Bahwa benar sejak bulan Januari 2013 s.d. 21 Oktober 2020 saya bertugas sebagai Ba Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel adapun Tugas pokok saya sebagai Penyidik Pembantu adalah membantu tugas Penyidik (dalam hal ini Kanit dan panit) dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan kewenangan ada pada Penyidik. Kemudian dalam bertugas saat itu saya bertanggungjawab kepada Kanit KOMPOL (PURN) ANTONI ADHI, S.H., M.H.

Bahwa benar saya ditunjuk untuk menangani berdasarkan disposisi dari Kanit KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. dan IPTU NAJAMUDIN, S.H. sebagai penyidik pembantu untuk menangani Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS tentang dugaan tindak pidana memalsukan surat- surat dan atau mengunakan surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP.

3) Dapat …..

Dapat saya jelaskan Kronologis/Peristiwa Tindak Pidana secara singkat atas adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS sebagai berikut:

Awalnya terjadi tindak pidana memalsukan surat-surat dan atau mengunakan Surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik yang diduga dilakukan oleh HERRU ARTTANS, terhadap korban SIMON WANGDRA yang terjadi pada bulan Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A Rivai Palembang dengan cara pelaku Sdr HERRU ARTANS mengunakan akta jual beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 18 Agustus 1977 untuk menggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG Putusan Nomor: 90/Pdt.G/2014/PN.Plg, 11 November 2014 dan putusan Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2015 isi gugatan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen haruslah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya yang mana sertifikat tersebut merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh Korban SIMON WANGDRA dan mengugat putusan NO.65/PDT.G/2002/PN.PLG, tanggal 2 September 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang NO.121/PDT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005 Menegenai Keberatan ad 4: Keberatan ini tidak di benarkan oleh karena pengandilan tinggi telah benar dalam pertimbangan hukumnya karna jual beli atas nama Mustian KS tidak pernah ada, yang mana pada saat ini terlapor HERRU ATTANS, tidak menyerahkan surat asli akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tgl 18 Agustus 1977, yang merupakan barang bukti dalam parkara yang di persangkakan.

Legal standing/bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1506/R atas nama TJAN FEE WEN ALIAS JULIANA TJANDRA,S.E.

Bahwa Surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dimana Akta Jual Beli tersebut sudah di nyatakan dalam Putusan NO.65/PDT.G/2002/PN.PLG tanggal 2 September 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang NO.121/PDT/2002/PT.PLG tanggal 27 November 2002 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005 yang intinya menyatakan Menegenai Keberatan ad 4: Keberatan ini tidak di benarkan oleh karena pengandilan tinggi telah benar dalam pertimbangan hukumnya karna jual beli atas nama Sdr MUSTIAN KALAWES tidak pernah ada. Kemudian pada tanggal 11 November 2014 Sdr HERU ARTANS mengajukan gugatan terhadap BPN RI dan BPN Provinsi Sumsel ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai Putusan Nomor: 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 November 2014 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai Putusan Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 menggunakan dasar Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977

yang .....

yang sudah jelas dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak pernah terjadi jual beli a.n. MUSTIAN KALAWES. Kemudian dengan gugatan yang dibuat Sdr HERU ARTANS kepada BPN RI dan BPN Provinsi Sumsel tersebut mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen (yang telah dijual kepada Sdr TJAN FEE WEN) dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa alasan penyidik menduga Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tersebut palsu karena setelah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan kami temukan berdasarkan keterangan Lurah 8 Ilir Kec Ilir Timur II Palembang a.n. R. MANTERI HAMID pada BAP 1 Agustus 2019 poin 7 dan 8 intinya menerangkan bahwa sesuai data arsip di Kel 8 Ilir Kec Ilir TImur II Palembang yang saat itu dijabat oleh Lurah R. MANTERI HAMID periode tahun 1976 s.d. 1979 tidak ada data Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 di dalam arsip Kelurahan dan berdasarkan keterangan Camat pada BAP tanggal 10 Agustus 2018 poin 6 intinya menerangkan bahwa Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 antara ABDULLAH HUSEIN dijual kepada MUSTIAN KALAWES tidak terdaftar dalam buku registrasi Akta Jual Beli tahun 1977 yang dilekuarkan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang.

Adapun selain tidak teregister di Kantor Kecamatan Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tersebut setelah kami lakukan penyitaan terhadap akta jual beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 yang dijadikan bukti pembanding lalu kami analisa ternyata terdapat perbedaan antara Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dengan Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 (bukti pembanding) dimana perbedaannya yaitu pada Kop, Cap Stempel, dan nama Lurah yang menjabat pada waktu itu.

Bahwa perbedaan terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dengan Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 (bukti pembanding) sebagai berikut:

1. Blangko keseluruhan berbeda;
2. Cap pejabat pembuat akta tanah / camat Ilir Timur II (AJB 64) sedangkan Cap asisten wedana Ilir Timur II (AJB 438 / pembanding);
3. Camat a.n. ASNAWI DAOED NIP 440000146 nya sama namun Cap Stempelnya berbeda;
4. Lurah a.n. ACHMAD ZAINURI (AJB 64) sedangkan Lurah a.n. HERMANTRY HAMID (AJB 438 / pembanding).

Adapun pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Camat Ilir Timur II a.n. Drs SYAHRULIGAMA pada tanggal 10 Agustus 2018 sempat

Ditanyakan …..

ditanyakan terkait dengan Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 dan dijawab bahwa sampai dengan saat ini terhadap AJB tersebut tidak terdaftar dalam buku registrasi Akta Jual Beli tahun 1977 yang dikeluarkan kantor Camat Ilir Timur II.

Bahwa tindakan atau langkah-langkah yang sudah dilakukan penyidik dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Maret 2018 diterima Laporan Polisi berdasarkan Disposisi Kanit I Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel atas nama KOMPOL ANTONI ADHI, S.H.MH ke BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H.
2. Pada tanggal 8 Maret 2018 dilaksanakan gelar awal diruangan unit I Subdit III yang dipimpin oleh Kanit I Subdit III KOMPOL ANTONI ADHI, S.H.MH. kemudian dilanjutkan melengkapi administrasi penyelidikan berupa :
3. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/174.a /III/2018/Ditreskrimum, tanggal 08 Maret 2018;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/174/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 08 Maret 2018;
5. Surat pemberitahuan penelitian Laporan Nomor: SP2HP/197/III/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Maret 2018;
6. Rencana Penyelidikan.
7. Melakukan pemeriksaan Intrograsi terhadap pelapor a.n. SIMON WANGDRA pada tanggal 12 Maret 2018;
8. Melakukan pemeriksaan Intrograsi terhadap a.n. TJAN FEE WEEN ALIAS JULIANA TJANDARA, SE pada tanggal 12 Maret 2018;
9. Melakukan pemeriksaan introgasi terhadap a.n. A.HIDJAZI BIN H.M.HARUN ZEN Pada tanggal 16 Maret 2018;
10. Melakukan pemeriksaan introgasi terhadap a.n. YULIE PATRICIA SIREGAR Pada tanggal 23 Maret 2018;
11. Melakukan pemeriksaan introgasi terhadap a.n. Drs. SYAHIRULIGAMA Pada tanggal 2 April 2018;
12. Melakukan pemeriksaan introgasi terhadap an. AHMAD SYABUDDIN, S.H. Pada tanggal 20 April 2018;
13. Melakukan pemeriksaan terhadap a.n. HERU ARTTANS sebagai Saksi Pada tanggal 14 Mei 2018;
14. Mengumpulkan alat bukti berupa fotocopy surat bukti pembanding, fotocopy Buku Register tahun 1977, fotocopy putusan Pengadilan Negeri NO.65/PDT.G/2002/PN.PLG, tanggal 2 September 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang NO.121/PDT/2002/PT.PLG tanggal 27 Nopember 2002 dan Putusan Kasasi Mahkama Agung No.1218 K/Pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005;

k. Melakukan …..

1. Melakukan Gelar perkara pada Kamis tanggal 26 Juli 2018 yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP FAISHOL MAJID, S.H., untuk peningkatan ke proses penyidikan dengan kesimpulan Gelar dapat ditingkatkan ke Proses Penyidikan.

Adapun menindaklanjuti hasil gelar perkara, kemudian selaku penyidik pembantu saya membuat Administrasi Penyidikan dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/220.a/VIII/2018/ Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/220/VIII/2018/ Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/211/ VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 08 Agustus 2018;
4. Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/197.a/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 08 Agustus 2018;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an. SIMON WANGDRA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan BAP Tambahan tanggal 05 Agustus 2019;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an. TJAN FEE WEEN ALIAS JULIANA TJANDARA, S.E. pada tanggal 10 Agustus 2018 dan BAP Tambahan tanggal 2 Agustus 2019;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an.A.HIDJAZI BIN H.M.HARUN ZEN pada tanggal 27 Agustus 2018 dan BAP Tambahan tanggal 2 Agustus 2019;
8. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi a.n. ISMI HARUN pada tanggal 27 Agustus 2018;
9. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi a.n. YULIE PATRICIA SIREGAR pada tanggal 24 Agustus 2018;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. AHMAD SYABUDDIN,SH pada tanggal 24 Agustus 2018 dan BAP Tambahan tanggal 08 Agustus 2019 dan BAP Tambahan tanggal 01 November 2019;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi a.n. Drs. SYAHIRULIGAMA (Camat Ilir Timur II) pada tanggal 10 Agustus 2018 dan BAP Tambahan tanggal 1 Agustus 2019;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi an. MUSTIAN MUSNI KALWES pada tanggal 03 September 2018 dan BAP tambahan 31 Juli 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019;
13. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. PM. SINAGA ALIAS PARLIN MUNTIR SINAGA pada tanggal 2 Oktober 2018 dan BAP tambahan 5 Agustus 2019 dan BAP Tambahan tanggal 5 September 2019;

n. Melakukan …..

1. Melakukan pemeriksaan terhadap AHLI PIDANA a.n. Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H. pada tanggal 29 Juli 2019;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an. HINDRY (Lurah 8 ILir) Pada tanggal 1 Agustus 2019;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi a.n. ABDULLAH HAMID ALIAS CEK OLA pada tanggal 05 Agustus 2019 dan BAP Tambahan tanggal 3 September 2019;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi a.n. M. SOLEH YASIN pada tanggal 5 Agustus 2019 dan BAP Tambahan tanggal 3 September 2019;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an. A. SYAHRONI, SH. (Notaris) pada tanggal 25 September 2019;
6. Melakukan pemanggilan terhadap HERU ARTTANS sebagai Saksi dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/170/II/2019/ Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2019, namun tidak hadir kemudian dengan surat panggilan ke-II sebagai saksi Nomor: Sp.gil/170.a/III/2019/Ditreskrimum tanggal 11 Maret 2019, juga tidak hadir;
7. Melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Mei 2019, yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP FAISHOL MAJID, S.H. Dengan kesimpulan terhadap terlapor HERU ARTTANS bisa ditetapkan sebagai Tersangka dan pada tanggal 13 Juni 2019 dibuatkan surat Penetapan Tersangka atas nama HERU ARTTANS;
8. Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sprin.Sita/123/V/2019/ Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2019 dilakukan penyitaan barang bukti;
9. Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sprin.Sita/146/VI/2019/ Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2019 dilakukan penyitaan barang bukti;
10. Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sprin.Sita/177/VII/ 2019/Ditreskrimum tanggal 03 Juli 2019 dilakukan penyitaan barang bukti;
11. Pada tanggal 16 Juli 2019, ada Supervisi dari Biro Wassidik Bareskrim Polri, dipimpin oleh KOMBESPOL Drs. JEBUL JATMOKO, M.Hum. dengan kesimpulan agar dibuatkan Surat Perintah membawa dan dipanggil sebagai tersangka;
12. Selanjutnya dibuatkan surat perintah membawa Nomor: Sprin-Bawa/170.b/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 18 Juli 2019 kemudian HERU ARTTANS diperiksa sebagai Saksi;
13. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019, HERU ARTTANS diperiksa sebagai Tersangka dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama H. MOHAMAD JAMIL,SH.,M.Si Pada kantor LAW FIRM JUSTICE CENTRAL Jalan Jendral sudirman Simpang Veteran ext Kantor Samudra Indonesia;

aa. Berdasarkan …..

1. Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/96/VII/2019/ Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2019, dilakukan penangkapan terhadap tersangka HERU ARTTANS;
2. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/69/VII/2019/ Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2019, dilakukan Penahanan terhadap tersangka HERU ARTTANS;
3. Pada tanggal 23 Juli 2019, dikirimkan Berkas Perkara atas nama tersangka a.n. HERU ARTTANS dengan Nomor: SBP/68/VII/2019/Ditreskrimum;
4. P.19 dari kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor: B-2491/L.6.4/Eku.2/07/2019 tanggal 31 Juli 2019;
5. Pada tanggal 8 Agustus 2019, dikirimkan kembali Berkas Perkara atas nama tersangka HERU ARTTANS dengan nomor : SBP/68.I/VIII/2019/Ditreskrimum;
6. P.19 (Ke-II) dari kejaksaan Tinggi Sumsel nomor : B-2806/L.6.4/Eku.2/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
7. Dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sprin.Han/69.C/VIII/ 2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019, dilakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka HERU ARTTANS, selanjutnya dibuatkan surat perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SPPT/69.D/VIII/2019/ Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019;
8. Pada tanggal 19 Agustus 2019, tersangka HERU ARTTANS melalui kuasa Hukumnya HANDY HAMID, SH. Mendaftarkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palembang kemudian pada tanggal 10 September 2019, dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor :13/Pidpra/2019/PN.Plg dengan putusan MENOLAK PRAPERADILAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN MENGHUKUM PEMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI SEBESAR NIHIL;
9. Pada tanggal 26 September 2019, dikirimkan kembali Berkas Perkara atas nama tersangka HERU ARTTANS dengan Nomor: SBP/68.II/VIII/2019/Ditreskrimum;
10. P.19 (Ke-III) dari kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor: B-3457/L.6.4/Eku.2/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019;
11. Pada tanggal 26 November 2019, dikirimkan kembali Berkas Perkara atas nama tersangka HERU ARTTANS dengan Nomor: SBP/68.III /XI/2019/Ditreskrimum;
12. P.21 dari kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor: B-4352/L.6.4/Eku.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019;
13. Melakukan pemanggilan ke-I terhadap HERU ARTTANS dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/37/I/2020/Ditreskrimum tanggal 08 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti, namun tidak hadir;

nn. Melakukan …..

1. Melakukan pemanggilan Ke-II terhadap HERU ARTTANS dengan surat panggilan nomor: Sp.gil/37.a/I/2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti, namun tidak hadir;
2. Melakukan pemanggilan Ke-III terhadap HERU ARTTANS dengan surat panggilan nomor :Sp.gil/37.b/I/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2020, untuk penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti, namun juga tidak hadir dengan alasan sakit namun tidak disertai dengan hasil rekam medis dari dokter;
3. Dengan surat perintah membawa Nomor: Sp.gil/37.c/II/2020/Ditreskrimum tanggal 13 Februari 2020, dilakukan perintah membawa terhadap tersangka HERU ARTTANS di Apartemen Kelapa Gading Jakarta namun tersangka HERU ARTTANS sedang sakit dan mendapatkan pengobatan Rawat Jalan (baru diberikan surat rekam medik), sehingga Penyidik **MENGAMBIL KEBIJAKAN** untuk tidak membawa tersangka HERU ARTTANS ke Palembang untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, dan Istri HERU ARTTANS, yang bernama HARTY HAMID, SH. Membuat pernyataan akan menghadirkan HERU ARTTANS ke Palembang apabila sudah sembuh;
4. Pada tanggal 11 AGUSTUS 2020, penyidik melihat kondisi HERU ARTTANS, di Jakarta namun HERU ARTTANS masih dalam keadaan sakit;
5. Bulan Februari 2021 HARTY HAMID, istri HERU ARTTANS datang ke Unit I Subdit III menemui Kompol ANTONI ADHI, S.H., M.H. memberikan penjelasan jika HERU ARTTANS telah meninggal dunia, namun surat keterangan meninggal dunia belum diberikan;
6. Pada tanggal 19 Oktober 2021 mengirimkan Surat kepada Lurah 20 Ilir di Kec Kemuning Kota Palembang Nomor: B/835/X/2021/Ditreskrimum tanggal 19 Oktober 2021 perihal permintaan keterangan Kematian a.n. Sdr HERU ARTANS kemudian dijawab dengan Surat Lurah 20 Ilir Kec Kemuning Nomor: 800/052/X/2021 pada tanggal 19 Oktober 2021 intinya menyatakan bahwa Kantor Lurah 20 Ilir satu Kecamatan Ilir Timur satu Kota Palembang tidak pernah membuat Surat Keterangan Kematian a.n. HERU ARTTANS;
7. Pada tanggal 19 Oktober 2021 kami mengirimkan surat Nomor: B/834/X/2021/Ditreskrimum perihal permintaan keterangan Kematian a.n. Sdr HERU ARTANS ke Lurah Sekip Jaya Kec Kemuning Kota Palembang dan dijawab dengan Surat Kelurahan Sekip Jaya Nomor: 400/65/SJ/2021 tanggal 19 Oktober 2021 intinya menyatakan bahwa Kelurahan Sekip Jaya Kec Kemuning Kota Palembang tidak pernah membuat surat kematian a.n. HERU ARTANS;
8. Pada tanggal 19 Oktober 2021 mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palembang

Nomor …..

Nomor: B/836/X/2021/Ditreskrimum perihal permintaan keterangan Kematian a.n. Sdr HERU ARTANS dan dijawab dengan Surat Nomor: 477/795/DKPS/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 intinya menyatakan bahwa Disdukcapil belum pernah membuat Surat Kematian a.n. HERU ARTANS;

1. Pada tanggal 27 Oktober 2021 mengirimkan Surat kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO Nomor: Ban/861/X/2021/Ditreskrimum perihal permintaan Surat Keterangan Kematian dan dijawab dengan Surat Nomor: UM.01.05/VII.4/51232/2021 tanggal 5 November 2021 intinya menyatakan bahwa pasien a.n. HERU ARTANS terakhir kali dirawat pada tanggal 2 Oktober 2020 di Cluster ENT RSCM Kencana dan tidak pernah menerbitkan Surat Kematian a.n. HERU ARTANS karena tidak ada di data rekam medis maupun data kematian di Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah.
2. Pada tanggal 1 November 2021 kami datang ke Kelurahan Sekip Jaya Kec Kemuning Kota Palembang kembali menanyakan terkait Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/134/SJ/2020 tanggal 29 Desember 2020 lalu setelah dicek kembali bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 Kelurahan Sekip Jaya Kec Kemuning Kota Palembang ada menerbitkan Surat Kematian a.n. HERU ARTTANS lalu Surat Kematian tersebut kami mintakan legalisirnya.
3. Pada tanggal 2 November 2021 melaksanakan gelar perkara di ruang Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumsel yang dipimpin oleh Kabagwassidik a.n. AKBP FAISOL MAJID dengan hasil gelar bahwa perkara tersebut dihentikan karena Tersangka telah meninggal dunia.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. dan dipaparkan oleh IPTU NAJMUDIN, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. AKBP KHUDRI M. (Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumsel);
2. AKBP JOKO S (Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumsel);
3. KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. (Kanit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel);
4. BRIPKA KGS BUDI UTAMA, S.H. (Banit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel);
5. BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H. (Banit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel);
6. BRIPDA RUTH DEBORA S (Banit 2 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel).

Kesimpulan:

Terhadap …..

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP.

Rekomendasi:

1. Dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;
2. Lengkapi mindik;
3. Buat LHP;
4. Kirimkan SP2HP.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 ada Supervisi yang dilakukan oleh Birowassidik Bareskrim Polri terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 yang kemudian dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh KOMBES POL Drs JEBUL SANTOSO JATMIKO, M.Hum dan dipaparkan oleh IPDA IBRAHIM AKIL (saya) dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. KOMBES POL WIBOWO;
2. KOMBES POL WAWAN M;
3. AKBP FAISOL MAJID;
4. AKBP YUDI S.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam supervise, telah dinaikan penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/ SPKT tanggal 28 Maret 2018 dan ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana memalsukan surat-surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Rekomendasi:

1. Agar penyidik membuat Surat Perintah Membawa;
2. Panggil tersangka.

Setelah itu pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. (Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Sumsel) dan dipaparkan oleh IPTU NAJMUDIN, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. AKBP JOKO S;
2. KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H.;
3. BRIPKA KGS BUDI UTAMA, S.H.;
4. BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H.;

Kesimpulan:

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP berdasarkan 2 (dua) alat bukti cukup yaitu keterangan saksi dan petunjuk dan terhadap terlapor dapat di panggil tersangka.

Rekomendasi:

1. Terhadap terlapor dapat dipanggil tersangka;

b. Lengkkapi …..

1. Lengkapi mindik;
2. Kirimkan SP2HP.

Bahwa pada tanggal 2 November 2021 penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL MAJID, S.H. dan dipaparkan oleh IPDA IBRAHIM AKIL, S.H. dengan peserta gelar sebagai berikut:

1. AKBP PARLINDUNGAN;
2. AKP WILLU OSCAR, S.E.;
3. AIPDA KGS BUDI UTAMA, S.H.;
4. BRIPKA OBRIEN CANDRA, S.H.;
5. BRIGADIR AZMI CAHYADI, S.H.

Kesimpulan:

Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 Pelapor a.n. SIMON WANGDRA telah terpenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 KUHP dan/atau 264 KUHP dan/atau 266 KUHP, bisa dihentikan karena tersangka telah meninggal dunia sesuai pasal 77 KUHP.

Rekomendasi:

1. Buat administrasi penghentian penyidikan;
2. Kirimkan SP2HP ke pihak Korban.

Bahwa alasan kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli yaitu karena setelah kami melakukan kordinasi dengan JPU pada bulan Juni 2019 (lupa pastinya) Bahwa JPU a.n. EDY menyampaikan bahwa agar penyidik berkordinasi dengan ahli apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan menurut kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli juga diatur dalam pasal 120 ayat 1 KUHAP “*DALAM HAL PENYIDIK MENGANGGAP PERLU, IA DAPAT MEMINTA PENDAPAT ORANG AHLI ATAU ORANG YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS*”. Dasar itu yang dijadikan acuan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan AHLI.

Adapun ahli a.n. Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H tersebut ditunjuk oleh Universitas Sriwijaya setelah penyidik mengirimkan Surat permintaan keterangan AHLI berdasarkan surat Nomor: Ban/406/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H. bahwa ia termasuk salah satu Ahli Pidana dari Universitas Sriwijaya yang memiliki Sertifikat Pendidik Nomor: 08100909827 yang lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional serta ia sering dimintai keterangan oleh penyidik untuk mencari titik terang dalam menangani suatu perkara.

Bahwa penyidik telah membuat surat permintaan keterangan AHLI berdasarkan surat nomor: Ban/406/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2019 kemudian Universitas Sriwijaya menunjuk Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H untuk memberikan keterangan sebagai ahli di Ditreskrimum Polda Sumsel.

12) Bahwa …..

Bahwa penyidik tidak tahu kalau Dr. H. SYARIPUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H. merupakan pihak atau kuasa hukum dari Sdr MUSTIANI MUSNI KALAWES karena Penyidik tidak diberitahu dan menurut penyidik pernyataan yang diberikan oleh ahli tersebut memberikan keterangan yang objektif dan tidak memihak Terlapor yang merupakan Kuasa Hukum pemilik awal Akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 8 Agustus 1977 yang kemudian dijual kepada Terlapor HERU ARTANS, dimana dalam keterangan ahli tersebut pada BAP tanggal 29 Juli 2019 menyatakan bahwa apabila Akta jual beli No. 64/VIII/4/IT-11/1977, tanggal 8 Agustus 1977 tidak teregister pada buku register Akta Jual Beli pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II tahun 1977 maka akta tersebut dianggap tidak benar atau palsu dan di dalam Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Jual Beli antara ABDULLAH HUSEIN dengan MUSTIAN KALAWES tidak pernah ada artinya surat atau akta tersebut tidak sah.

Penyidik tidak melakukan uji Laboratorium Forensik terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977, karena Sdr. HERU ARTTANS tidak memberikan/menyerahkan Akta Aslinya.

Bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 tersebut kami lakukan penyitaan sebagaimana jawaban saya pada nomor 21 diatas dimana pada saat kami lakukan penyitaan tersebut dari Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang kami meminta nya dari PNS RIZKI IRSAN (staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang) dimana kami meminta contoh AJB yang dikeluarkan pada tahun 1976, 1977, dan 1978 sebagai bukti pembanding terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 namun saat itu kami tidak mengecek apakah bukti pembanding yang diberikan tersebut terregister juga di Buku Register di Kecamatan karena kami menganggap contoh AJB yang diberikan PNS RIZKI IRSAN (staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang) tersebut sudah benar.

Bahwa benar setelah diperlihatkan buku register dari Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tahun 1977 tersebut ditemukan bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 yang dijadikan bukti pembanding tidak terregister pada buku register Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tahun 1977 dan alasan saya pada saat itu tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap AJB yang dijadikan bukti pembanding tersebut karena saat itu bukti pembanding diambil dari staf Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang a.n. PNS RIZKI IRSAN jadi saya menganggap terhadap surat yang diberikan tersebut sudah benar sesuai ketentuan di Kecamatan namun ternyata setelah pemeriksa memperlihatkan buku Register Akta Jual Beli pada tahun 1977 tidak ada tercatat Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 dan saya juga belum pernah bertanya kepada pihak Kecamatan mengapa bukti pembanding yang diberikan tersebut tidak teregister pada buku register Akta Jual Beli tahun 1977.

16) Bahwa …..

Bahwa tujuan penyidik melakukan penyitaan terhadap akta jual beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 yang dijadikan bukti pembanding dengan Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tersebut, berdasarkan analisa hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat nama lurah yang berbeda pada tahun 1977 dan cap stampel yang berbeda maka dari itu penyidik melakukan penyitaan guna menentukan seperti apa AJB yang asli yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

d. Berdasarkan keterangan **AIPDA** **KGS BUDI UTAMA, S.H., M.Si.** NRP 87080681, Jabatan Banit I Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel, pada Intinya menerangkan:

Bahwa saya termasuk dalam Sprint penangan Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. Pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS, tetapi bukan saya penyidik pembantu untuk Laporan Polisi tersebut, yang menangani perkara tersebut adalah Penyidiknya KOMPOL ANTONI ADHI, S.H., M.H. dan IPTU NAJAMUDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu BRIGADIR IBRAHIM AKIL, S.H.

Saat ini tindak lanjut perkembangan penangan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 dengan Pelapor a.n. Sdr. SIMON WANDRA dan Terlapor a.n. HERU ARTTANS terkait dugaan tindak pidana memalsukan surat-surat dan atau mengunakan surat Palsu dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 02 November 2021, dengan kesimpulan perkara dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia. dan berkas penghentian masih berada di ruangan bapak Direktur, menunggu disposisi apakah perkara tersebut dihentikan atau tidak.

Penyidik baru mendapatkan surat keterangan kematian HERU ARTTANS pada bulan Oktober 2021, karena sejak Februari 2021 HARTTHY istri HERU ARTTANS menghadap Penyidik KOMPOL ANTONI ADHI, SH.MH belum memberikan Surat keterangan kematian.

Berkas perkara sudah dikembalikan oleh JPU (P.21 A) berdasarkan surat Nomor : 2691/L.6.4/Eku.1/07/2020 tanggal 8 Juli 2020.

Adapun selama kami berupaya menyerahkan Tersangka ke JPU (tahap II) penydik tidak pernah memberitahu kepada JPU bahwa Sdr HERRU ARTTANS sedang sakit.

Setelah menerima Surat Kematian Sdr HERU ARTTANS telah dilakukan Gelar Perkara Pada tanggal 2 November 2021 dengan hasil gelar bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya, karena Sdr HERRU ARTTANS telah meninggal dunia dan penyidik telah mengajukan Nota Dinas untuk menghentikan penyidikan kepada Direktur.

3. Berdasarkan …..

1. Berdasarkan keterangan **AHMAD SYAHABUDDIN,** TTL: Palembang, 3 Oktober 1970, Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumuli, pada Intinya menerangkan:

Saya pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sejak 24 Mei 2017 s.d. November 2020. Adapun tugas pokok dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah melakukan pengordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konfilik, dan Perkara Pertanahan serta Pengendalian Pertanahan dimana dalam bertugas saya bertanggungjawab kepada Kepala BPN RI.

Bahwa saya tidak mengetahui apakah pada saat itu dilakukan pengukuran dan pengecekan terhadap batas-batas objek tanah sesuai Surat Hak Milik Nomor: 1506/R Kampung 8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 tersebut namun saat saat saya lihat arsip yang ada di BPN Kota Palembang sesuai Gambar Situasi telah dilakukan pengukuran sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 dengan luas 3990 M2

Bahwa benar berdasarkan data Arsip yang ada di BPN Kota Palembang pada tahun 1980 pernah ada terbit Surat Hak Milik Nomor: 1506/R tanggal 13 Desember 1980 Kampung 8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 dimana saat itu yang mengajukan adalah Sdr H HARUN Bin ZEN.

Bahwa dasar penerbitan Surat Hak Milik Nomor: 1506/R tanggal 13 Desember 1980 Kampung 8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 yang diajukan oleh H. M. HARUN Bin ZEN sebagai berikut:

1. Permohonan Konversi dan Sertifikat a.n. H. M. HARUN ZEN pada tanggal 22 Agustus 1980;
2. Pengumuman Nomor: 428/K/1980 tanggal 4 September 1980;
3. Daftar Riwayat Tanah Pemilik H. M. HARUN ZEN tanggal 4 September 1980;
4. Surat Jual dan Beli Kebon, Buah-buahan, dan sebuah pondok seharga F 1000;
5. Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 dengan luas 3990 M2.

Bahwa silsilah Kepemilikan objek tanah sebelum terbit Surat Hak Milik Nomor: 1506/R Kampung 8 Ilir yaitu diawali dari tanah milik Lau Koe kemudian dibeli oleh Sdr HARUN Bin ZEN pada tahun 1979 yang kemudian diajukan SHM pda tahun 1980 sebagaimana Surat Hak Milik Nomor: 1506/R Kampung 8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 a.n. H. M. HARUN Bin ZEN lalu objek tanah tersebut dibeli oleh Sdri TJAN FEE WEN (istri SIMON WANGDRA) menggunakan Akta Jual Beli Nomor: 119/IT.II/2012 tanggal 12 November 2012 lalu SHM tersebut sejak tahun 2013 sudah dipecah menjadi 15 (lima belas) SHM sebagai berikut:

1. SHM Nomor: 12379/ 8 Ilir, SU No 201 tanggal 2 Desember 2013 milik SUGIANTO;

b) SHM …..

1. SHM Nomor: 12380/ 8 Ilir, SU No 202 tanggal 2 Desember 2013 milik SUGIANTO;
2. SHM Nomor: 12381/ 8 Ilir, SU No 203 tanggal 2 Desember 2013 milik HENDRA;
3. SHM Nomor: 12382/ 8 Ilir, SU No 204 tanggal 2 Desember 2013 milik HENDRA;
4. SHM Nomor: 12383/ 8 Ilir, SU No 205 tanggal 2 Desember 2013 milik TJAN FEE WEN, YULIANA TJANDRA, S.E;
5. SHM Nomor: 12389/ 8 Ilir, SU No 211 tanggal 12 Desember 2013 milik TJAN FEE WEN, YULIANA TJANDRA, S.E.;
6. SHM Nomor: 12390/ 8 Ilir, SU No 212 tanggal 12 Desember 2013 milik SIAUW FUK NGIN TOMMY;
7. SHM Nomor: 12391/ 8 Ilir, SU No 213 tanggal 12 Desember 2013 milik SIAUW FUK NGIN TOMMY;
8. SHM Nomor: 12392/ 8 Ilir, SU No 214 tanggal 12 Desember 2013 milik SIAUW FUK NGIN TOMMY;
9. SHM Nomor: 12393/ 8 Ilir, SU No 215 tanggal 12 Desember 2013 milik TJEN SIAT HOA-SILVIA CHANDRA;
10. SHM Nomor: 12394/ 8 Ilir, SU No 216 tanggal 12 Desember 2013 milik TJEN SIAT HOA-SILVIA CHANDRA;
11. SHM Nomor: 12395/ 8 Ilir, SU No 217 tanggal 12 Desember 2013 milik SUGIANTO GUNAWAN;
12. SHM Nomor: 12396/ 8 Ilir, SU No 218 tanggal 12 Desember 2013 milik SUGIANTO GUNAWAN;
13. SHM Nomor: 12397/ 8 Ilir, SU No 219 tanggal 12 Desember 2013 milik RIANA;
14. SHM Nomor: 12398/ 8 Ilir, SU No 220 tanggal 12 Desember 2013 milik IMELDA INDRAWATY KESUMA.

Bahwa benar BPN Kota Palembang dan BPN RI pernah dilakukan gugatan oleh Sdr HERU ARTANS terkait dengan penerbitan Surat Hak Milik Nomor: 1506/R Kampung 8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2155 tanggal 30 Juni 1979 a.n. H. M. HARUN Bin ZEN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 90/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 11 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2018 dengan hasil menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen haruslah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa pada saat itu BPN RI dan BPN Kota Palembang tidak mengajukan gugatan lagi atau Kasasi setelah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT. PLG tanggal 28 Oktober 2015 sehingga Putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) namun alasan BPN Kota Palembang tidak melakukan kasasi saya tidak mengetahui karena yang mengikuti sidang dan menangani perkara tersebut di BPN yaitu Sdr NASRON (Kepala Seksi Konflik dan Perkara BPN Palembang).

8) Bahwa …..

Bahwa BPN Kota Palembang belum menindaklanjuti hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 90/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 11 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2018 karena terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen pada tahun 2013 telah dipecah menjadi 15 (lima belas) SHM sebagaimana jawaban saya pada nomor 10 diatas sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R tersebut sudah menjadi warkah dan arsip Dokumen Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang serta terhadap SHM tersebut tidak berlaku lagi. Kemudian karena hasil dari Putusan Sidang Tersebut menyatakan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506/R Gambar situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M Harun Bin H. M Zen pada tahun 2013 haruslah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya kemudian saya bingung bagaimana cara membatalkan SHM tersebut karena sudah dipecah. Adapun BPN Kanwil Provinsi Sumsel pernah ada meminta penjelasan terkait dengan adanya putusan tersebut namun saya lupa waktunya kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang memerintahkan saya untuk menjawab surat dimaksud dengan isi intinya menjelaskan bahwa terhadap persoalan tersebut bahwa yang ada di dalam putusan menyatakan bahwa membatalkan SHM 1506/R tetapi berdasarkan data SHM yang digugat tersebut sudah habis dipecah dan dijadikan warkan pada BPN Kota Palembang namun setelah itu tidak ada balasan lagi dari BPN Kanwil Sumsel.

f. Berdasarkan keterangan **SYAHRULIGAMA** TTL: Palembang, 6 Februari 1974, Pekerjaan Kepala Kecamatan Ilir II, pada Intinya menerangkan:

1. Bahwa untuk Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 8 Agustus 1977 benar ada di Kecamatan Ilir Timur II, tetapi dalam buku register 64 (enam empat) bukan a.n MUSTIAN KALAWES melainkan nama orang lain , yakni Sdri FATHIMAH dan Sdr HAMID yang dijual kepada Sdr IBRAHIM yang beralamat di 20 Ilir Sekip Palembang.
2. Sepengetahuan Saya jika Jual Beli objek tanah yang tidak terregister di Kecamatan Ilir Timur II maka tidak dapat dilakukan administrasi, pembuatan Ahli Waris dan dilakukannya Jual Beli.
3. Alasan penyidik melakukan penyitaan Akta Jual Beli Nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 dari Kecamatan Ilir II berdasarkan keterangan penyidik (lupa namanya) dokumen-dokumen yang diminta atau diamankan atau dipinjam sebagai bukti pembanding terhadap Akta Jual beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977 tanggal 18 Agustus 1977 yang dimiliki Sdr HERU ARTTANS yang diduga palsu dan juga tidak terdaftar pada buku register pada kecamatan Ilir Timur II.

4) Bahwa …..

1. Bahwa setelah saya lakukan pengecekan terhadap Surat Akta Jual Beli Nomor: 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976 pada Buku Register Jual Beli di kecamatan Ilir Timur II benar telah tercatat a.n NAZARUDDIN namun ada keliru terkait dengan penanggalannya. Kemudiaan pada Akta Jual Beli Nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 tanggal 7 Januari 1977 benar tidak tercatat pada Buku Register. Pada Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 kami tidak memilik arsip buku registernya mungkin hilang atau terselip dalam arsip tetapi kami akan tetap mencarinya dan apabila diktemukan akan kami berikan kepada pemeriksa, karena pada saat itu terjadi renovasi ruangan sehingga berkas-berkas arsip banyak yang hilang.
2. Dalam Fotocopy Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 didasarkan dan dilihat dari Surat Ukur tanggal 24 Maret 1976 No.429/1976 dengan luas 4055 M2, berukuran panjang kurang lebih 73 M3 dan 52 M3, lebar kurang lebih 45 M3 dan berbatasan disebelah:

Utara: Nangtjik Budjil   
Timur: Jl. Kenten   
Selatan: Djen   
Barat: Asir

g. Berdasarkan keterangan **RIZKI IRSAN** TTL: Palembang, 18 Juli 1979, Pekerjaan PNS Staf Kecamatan Ilir Timur II, pada Intinya menerangkan:

1. Bahwa benar saya pernah bertugas sebagai Staf Bagian Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur II sejak bulan Agustus 2017 s.d. sekarang. Adapun tugas pokok dan tanggungjawab saya adalah melayani masyarakat, pembuatan Surat tanah, Kependudukan, dan Administrasi Pemerintahan lainnya.
2. Bahwa dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/III/2018/SPKT tanggal 28 Maret 2018 a.n. pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ATTANS tersebut penyidik ada mengirimkan Surat kepada Kantor Kecamatan Ilir Timur II namun untuk suratnya masih dicari dan akan diberikan kepada pemeriksa apabila ditemukan.

Adapun mekanisme peminjaman Surat tersebut yaitu setelah penyidik mengirimkan Surat permintaan peminjaman berkas pada sekira akhir tahun 2019 lalu penyidik (lupa namanya) menelfon saya mengatakan *“pak ada berkwas-berkas yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menangani perkara berupa buku register akta jual beli tahun 1977 dan akta jual beli yang ada pada arsip Kecamatan yang dikeluarkan pada tahun 1976, 1977, 1978”* lalu saya jawab *“iya pak kami carikan dahulu”* setelah itu sekira akhir tahun 2019 (lupa bulannya) 2 (dua) orang Penyidik (lupa namanya) datang ke Kantor Kecamatan Ilir Timur II kemudian saya diperintahkan oleh Camat Drs SYAHIRULIGAMA untuk memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh penyidik lalu saya cari kemudian saya ambil Akta Jual

Beli …..

Beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 setelah itu saya berikan kepada penyidik (lupa namanya) setelah itu penyidik membuatkan berita acara peminjaman alat bukti sebanyak 2 (dua) lembar lalu saya tandatangani dan ditandatangani juga oleh penyidik lalu saya diberikan satu sebagai arsip.

1. Bahwa berdasarkan keterangan penyidik (lupa namanya) dokumen-dokumen yang diminta atau diamankan atau dipinjam berupa Akta Jual Beli yang dikeluarkan pada tahun 1976, 1977, dan 1978 sesuai Akta Jual Beli Nomor 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 tersebut akan digunakan sebagai bukti pembanding terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977 tanggal 18 Agustus 1977 dengan pemilik a.n. HERU ARTANS yang diduga palsu dan juga tidak terdaftar pada buku register pada Kecamatan Ilir Timur II.
2. Bahwa benar saya pernah melakukan pengecekan terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977 tanggal 18 Agustus 1977 pada buku Register Jual Beli di Kantor Kecamatan Ilir Timur II tahun 1977 dimana di dalam Buku Register tersebut pada register nomor 64 tanggal 9 Februari 1977 tercatat atas nama FATIMAH dan HAMID dijual kepada IBRAHIM yang beralamat di 20 Ilir Sekip Palembang (untuk suratnya saat ini masih dicari dan apabila sudah ditemukan akan diserahkan kepada pemeriksa). Adapun hal tersebut dapat terjadi karena mungkin terjadi pemalsuan atau pada saat itu tata administrasi nya belum baik jadi terjadi tidak teregisternya AJB tersebut.
3. Bahwa penyidik pernah menunjukan kepada saya Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977 tanggal 18 Agustus 1977 tersebut dimana terhadap AJB tersebut sempat saya perbandingkan dengan yang ada pada arsip di Kecamatan yang dikeluarkan pada tahun 1977 dimana terdapat perbedaan sebagai berikut::
4. Blangko keseluruhan berbeda;
5. Cap pejabat pembuat akta tanah / camat Ilir Timur II (AJB 64) sedangkan Cap asisten wedana Ilir Timur II (AJB 438 / pembanding);
6. Camat a.n. ASNAWI DAOED NIP 440000146 nya sama namun Cap Stempelnya berbeda;
7. Lurah a.n. ACHMAD ZAINURI (AJB 64) sedangkan Lurah a.n. HERMANTRY HAMID (AJB 438 / pembanding) dan juga cap stempelnya berbeda.
8. Bahwa setelah saya lakukan pengecekan terhadap surat Akta Jual Beli Nomor: 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976 pada Buku Register Jual Beli di Kecamatan Ilir Timur II benar telah tercatat atas nama NAZARUDIN namun ada keliru terkait dengan penanggalannya.

Kemudian …..

Kemudian pada Akta Jual Beli Nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 benar tidak tercatat pada buku register tahun 1977 dan terhadap Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 kami tidak memiliki arsip buku registernya mungkin hilang atau terselip tetapi kami tetap mencarinya dan apabila ditemukan akan kami berikan kepada pemeriksa karena pada saat itu tejadi renovasi ruangan sehingga berkas-berkas arsip banyak yang hilang namun dapat dipastikan apabila arsip suratnya AJB nya ada di Kantor Kecamatan maka benar telah terjadi jual beli pada waktu itu.

3. Barang Bukti dan dokumen yang diamankan antara lain:

1. 1 (Satu) Bendel Berkas Perkara Nomor: BP/74/VII/2019/Ditreskrimum Tanggal 22 Juli 2019;
2. 6 (enam) lembarLaporan Gelar Perkara tingkat sidik No: 315/VII/2018/Wassidik tanggal 26 Juli 2018;
3. 7 (tujuh) lembar Laporan Gelar Perkara tap Tersangka No: 273/V/2019/Wassidik tanggal 17 Mei 2019;
4. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Supervisi Wassidik Bareskrim Polri tanggal 16-18 Juli 2019;
5. 5 (lima) lembar Laporan Gelar Perkara henti No: 566/XI/2021/Wassidik tanggal 2 November 2021;
6. Buku Register Akta Jual Beli dan Pelepasan di Kecamatan Ilir Timur II tahun 1975/1976.

**IV. ANALISA FAKTA DAN YURIDIS**

1. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi a.n. Sdr HARTY HAMID, AKP NAJMUDIN, IPDA IBRAHIM AKIL, AIPDA BUDI, Sdr SYAHRULIGAMA, Sdr AHMAD SYAHABUDDIN, Sdr RIZKI IRSAN, dan alat bukti surat berupa administrasi penyelidikan pada intinya menerangkan fakta sebagai berikut:

* 1. Bahwa benar Ditreskrimum Polda Sumsel menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 a.n. Pelapor SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ARTANS.
  2. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel telah meningkatkan penanganan perkaranya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara tanggal 26 Juli 2018 yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL (Kabagwassidik).
  3. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, ahli sebanyak 1 (satu) orang, dan tersangka 1 (satu) orang.
  4. Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel dalam melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana a.n. dr SYARIFUDDIN PETANASSE, S.H., M.H. telah membuat surat permohonan keterangan ahli kepada Universitas Sriwijaya sesuai Surat Ditreskrimum Polda Sumsel Nomor: BAN/406/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2019 dan surat tugas dari Unsri Nomor: 0111/un9.fh/tu.st/2019 tanggal 29 Juli 2019 dimana diduga ahli tersebut memiliki conflict of interest (konflik benturan kepentingan) dalam perkara dimaksud karena merupakan kuasa hukum dari MUSTIANI

MUSNI .....

MUSNI KALAWES (pihak yang sebelumnya telah menjual bidang tanah sengketa tersebut kepada Sdr. HERU ARTTANS melalui kuasanya yakni PARLIN MUNTIR SINAGA dan istrinya T.E. TAMBUNAN), bila ahli memiliki conflict of interest (konflik benturan kepentingan) harusnya keterangan yang diberikan menguatkan HERU ARTANS dan menyatakan bahwa AJB 64 tersebut sah akan tetapi faktanya justru melemahkan HERU ARTANS dengan mengatakan bahwa apabila AJB 64 tidak terdaftar di register kecamatan berarti akta tersebut tidak benar (palsu). dengan demikian menurut Akreditor sudah objektif dan tidak berpihak kepada tersangka HERU ARTANS.

BAP ahli hukum pidana a.n. Dr SYARIFUDDIN PETANASSE, S.H., M.H. tanggal 29 Juli 2019 menerangkan:

barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jiika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah barang siapa maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana, dengan sengaja artinya willen en wetten artinya orang tersebut menyadari dan menginsyafi perbuatannya kemudian memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati artinya surat tersebut tidak benar, kemudian jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya kerugian tersebut tidak musti terjadi. bahwa mengenai Putusan Kasasi MA No 1218k/pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005 berbunyi mengenai keberatan ad 4: keberatan ini tidak dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah benar dalam pertimbangan hukumnya karena jual beli a.n. MUSTIAN KALAWES tidak pernah ada dan sebelum menggugat BPN mereka memahami isi putusan Kasasi MA No 1218k/pdt/2003 tanggal 21 Maret 2005 dan berdasarkan format AJB Tahun 1976,1977, dan 1978 yang dikeluarkan Kantor Camat Ilir Timur II, setelah diperiksa ada perbedaan penulisan penomoran akta, cap dan berdasarkan buku register AJB Camat Ilir Timur II tahun 1977, antara abdullah husein dijual kepada MUSTIAN KALAWES tidak terdaftar, melainkan terdaftar a.n. orang lain. untuk itu Tersangka HERU ARTANS telah memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan pasal 263 ayat (2) KUHP atau pasal 264 KUHP.

* 1. Penyidik telah menetapkan Tersangka a.n. HERU ARTANS berdasarkan gelar perkara tanggal 17 Mei 2019 yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL, dimana penetapan tersangka tersebut penyidik telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti diantaranya keterangan saksi, ahli, bukti surat berupa buku register AJB tahun 1977 di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Putusan PN No 90 dan PT No 52. adapun terhadap Akta Jual Beli Nomor: 64/VIII/4/IT-11/1977 tanggal 18 Agustus 1977 tersebut tidak teregister di buku register AJB tahun 1977 dan jika dibandingkan dengan arsip AJB yang ada di Kecamatan ditemukan perbedaan diantaranya:

1. Blangko keseluruhan berbeda;
2. Cap pejabat pembuat akta tanah / Camat Ilir Timur II (AJB 64) sedangkan cap Asisten Wedana Ilir Timur II (AJB 438 / pembanding);
3. Nama camat a.n. ASNAWI DAOED Nip 440000146 nya sama namun cap stempelnya berbeda;
4. Lurah a.n. ACHMAD ZAINURI (AJB 64) sedangkan lurah a.n. HERMANTRY HAMID (AJB 438 / pembanding) dan juga cap stempelnya berbeda.

f. bahwa …..

* 1. bahwa terhadap perkara tersebut juga pernah dilakukan asistensi/supervisi oleh Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 16-18 Juli 2019 yang dilakukan oleh KBP JEBUL, dkk 2 (dua) orang dengan hasil terhadap perkara tersebut ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana.
  2. Bahwa terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018, penyidik telah merampungkan penanganan perkaranya menjadi Berkas Perkara Nomor: BP/68/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 23 Juli 2019 serta telah menyerahkan berkas perkara dimaksud kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sumsel No: SBP/68/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 23 Juli 2019 kemudian berkas perkara dikembalikan (P19) karena belum lengkap sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sumsel No: B-2491/l.6.4./eku.2/07/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 penyidik menyerahkan untuk ke dua kalinya Berkas Perkara Nomor: BP/68.I/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2019 ke JPU sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sumsel No: SP/68.I/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2019 kemudian berkas perkara dikembalikan (P19) ke-II sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sumsel No: B-2806/l.6.4/eku.2/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 penyidik menyerahkan untuk ke tiga kalinya Berkas Perkara Nomor: SBP/68.II/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 16 September 2019 ke JPU sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sumsel No: SBP/68.II/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 16 September 2019 kemudian berkas perkara dikembalikan (P19) ke-III sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sumsel No: B-3457/l.6.4/eku.2/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

Setelah itu pada tanggal 6 November 2019 penyidik menyerahkan untuk ke empat kalinya Berkas Perkara Nomor: SBP/68.III/XI/Ditreskrimum tanggal 6 November 2019 ke JPU sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sumsel No: SBP/68.III/XI/2018/Ditreskrimum tanggal 6 November 2019 kemudian Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sumsel No: B-4352/l.6.5/eku.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

* 1. Penyidik telah melakukan penyitaan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II terhadap Akta Jual Beli No. 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 yang digunakan sebagai bukti pembanding, dimana setelah dilakukan pengecekan oleh akreditor terhadap bukti pembanding tersebut ditemukan bahwa surat Akta Jual Beli Nomor: 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976 pada buku register jual beli tahun 1976 di Kecamatan Ilir Timur II benar telah tercatat atas nama NAZARUDIN namun ada keliru terkait dengan penanggalannya. Kemudian pada Akta Jual Beli Nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 benar tidak tercatat pada buku register tahun 1977 dan terhadap Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/IT-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 Kantor Kecamatan Ilir Timur II tidak dapat menunjukan buku registernya karena berdasarkan keterangan staf kecamatan a.n. RIZKI IRSAN bahwa terhadap buku register tersebut hilang atau terselip pada saat tejadi renovasi ruangan sehingga berkas-berkas arsip banyak yang hilang.

i. Fakta …..

* 1. Fakta bahwa tersangka a.n. HERU ARTANS melalui kuasa hukumnya a.n. HENDY mengajukan gugatan praperadilan pada bulan Agustus 2019 dengan dalil penetapan tersangka a.n. HERU ARTANS yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel tidak sah dengan alasan sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang No 52/pdt/2015/pt.plg tanggal 28 Oktober 2015 yang intinya menyatakan bahwa pemohon (Sdr HERU ARTANS) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai AJB 64 dan membatalkan SHM 1506/R kemudian dari Praperadilan tersebut berdasarkan Putusan Prapid No: 13/pid.pra/2019/pn plg, hasilnya hakim menyatakan *“menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”*.

Adapun di dalam pertimbangan hakim praperadilan intinya bahwa dalam menilai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dinilai dari aspek formil yaitu penyidik telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, dan bukti surat.

* 1. Terhadap Berkas Perkara sudah dikembalikan oleh JPU (P 21 A) pada tanggal 8 Juli 2020 sesuai Surat No: 2691/l/6.4./eku.1./07/2020 tanggal 8 Juli 2020 karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka (tahap 2) namun alasan penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka HERU ARTANS karena saat itu tersangka sedang sakit dan penyidik sudah berupaya melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali datang ke Jakarta untuk menemui tersangka dengan membawa dokter Rs Bhayangkara Sumsel a.n. MANSURI dan dokter menyatakan bahwa terhadap tersangka tidak dapat dibawa untuk diserahkan ke JPU karena tidak memungkinkan jika dilihat dari kondisi kesehatan tersangka a.n. HERU ARTANS hingga penyidik mendapatkan kabar bahwa tersangka telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020.
  2. Fakta bahwa pada tanggal 2 November 2021 dilaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP FAISHOL dengan hasil perkara tersebut dihentikan karena tersangka meninggal dunia, dimana alasan penyidik baru melaksanakan gelar perkara tersebut karena Sdri HARTY HAMID (istri HERU ARTANS) pada bulan Februari 2021 datang ke kantor menyatakan bahwa tersangka telah meninggal dunia lalu penyidik mengirimkan surat kepada Disdukcapil, Kel Sekip Jaya, dan Kel Ilir Timur II untuk meminta Surat Keterangan Kematian a.n. HERU ARTANS namun belum ada lalu pada akhir bulan Oktober 2021 penyidik baru mendapatkan surat keterangan kematian a.n. HERU ARTANS dari Kel Sekip Jaya. perkara tersebut sudah dihentikan sebagaimana Sprin Henti No: Sprin-Dik/188/xii/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Ketetapan Henti No: S.Tap/188.a/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2021.

Dengan demikian sebagaimana uraian fakta tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

* + 1. Dalam hal penetapan tersangka Sdr HERU ARTANS, penyidik telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup dan juga telah dilakukan asistensi / supervisi oleh birowassidik bareskrim polri pada tanggal 16-18 Juli 2019, selain itu dikuatkan dengan adanya P-21 dari

Kejaksaan …..

Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Putusan Praperadilan No: 13/pid.pra/2019/PN PLG tanggal 19 Agustus 2019 yang intinya hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dinilai dari aspek formil telah sah secara hukum karena telah mencukupi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 Kuhap Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, artinya penyidik telah profesional dalam menangani perkara namun dikarenakan tersangka setelah ditangguhkan mengalami sakit ginjal sehingga penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka ke JPU (tahap 2) hingga Kejaksaan Tinggi Palembang mengembalikan Berkas Perkara kepada penyidik (P21 A), hal tersebut terjadi karena penyidik mengedepankan hak asasi manusia terhadap tersangka a.n. HERU ARTANS.

* + 1. Terkait dengan fakta pemeriksaan terhadap ahli pidana Sdr Dr SYARIFUDDIN PETANASSE, S.H., M.H. tersebut penyidik telah membuat surat permohonan keterangan ahli kepada Universitas Sriwijaya (unsri) lalu unsri menunjuk Dr SYARIFUDDIN PETANASSE untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dan terhadap ahli tersebut telah memiliki kompetensi sebagai ahli krna beliau telah menjadi dosen di Unsri sejak tanggal 1 Maret 1981 s.d. dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan memiliki sertifikat pendidik no: 08100909827, dimana ahli tersebut diduga memiliki conflict of interest (konflik benturan kepentingan) dalam perkara dimaksud karena merupakan kuasa hukum dari MUSTIANI KALAWES (pihak yang sebelumnya telah menjual bidang tanah sengketa tersebut kepada Sdr. HERU ARTTANS melalui kuasanya yakni parlin muntir sinaga dan istrinya T.E. TAMBUNAN), tetapi dalam memberikan keterangan ia telah sesuai dengan keahliannya secara objektif dan tidak memihak kepada Sdr HERU ARTANS, dilihat dari keterangannya yang digunakan oleh JPU dan hakim praperadilan dalam memutuskan perkara dimaksud.
    2. Terkait dengan bukti pembanding yang disita oleh penydidik dari Kecamatan Ilir Timur II berupa Akta Jual Beli No. 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976, Akta Jual Beli No. 438/1977 tanggal 7 Januari 1977, dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 645/it-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 tersebut ditemukan bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor: 320/1976 tanggal 13 Oktober 1976 pada buku register jual beli tahun 1976 di Kecamatan Ilir Timur II benar telah tercatat atas nama Nazarudin dijual kepada ny MASTURAH namun ada keliru terkait dengan penanggalannya. kemudian pada akta jual beli nomor: 438/1977 tanggal 7 Januari 1977 benar tidak tercatat pada buku register tahun 1977 dan terhadap akta pelepasan hak nomor: 645/it-II/1978 tanggal 20 Desember 1978 pihak Kecamatan Ilir Timur II tidak dapat menunjukan buku registernya karena berdasarkan keterangan pihak Kecamatan Ilir Timur II bahwa terhadap buku register tersebut hilang atau terselip pada saat tejadi renovasi ruangan sehingga berkas-berkas arsip banyak yang hilang.

Adapun terkait dengan bukti pembanding yang tidak terregister tersebut sebagaimana pernyataan dari Kepala Camat Ilir Timur II a.n. syahiruligama dan Staf Kecamatan Ilir Timur II a.n. RIZKI IRSAN bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pada saat itu kemungkinan tata administrasinya kurang baik dan dapat dipastikan apabila arsipnya ada di kantor kecamatan berarti benar telah terjadi jual beli.

IV HASIL …..

**V. HASIL GELAR PERKARA AUDIT INVESTIGASI**

Berdasarkan Gelar Perkara tanggal 9 Desember 2021 yang dihadiri oleh KOMBES POL SIGIT JATMIKO (Itwasum Polri), KOMBES POL AHMAD ZAENUDDIN (Roprovos Divpropam Polri), KOMBES POL ZARIALDI (Birowassidik Bareskrim Polri), AKBP HORAS M SILAEN (Biro Psikologi SSDM Polri), KOMPOL TIGA PRAYITNO (Ropaminal Divpropam Polri), KOMPOL JONI SUSILO (Divkum Polri), AKP IDHAM FADHILAH (Ropaminal Divpropam Polri), AKP SUMARDIYANA (Bagyanduan Divpropam Polri) menyimpulkan bahwa sebagaimana pengaduan dari Sdr. MUHAMMAD JAMIL dengan memperhatikan fakta hasil audit investigasi disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sulsel yang menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 tersebut, maka direkomendasikan audit investigasi dihentikan oleh Rowabprof Divpropam Polri dan segera menerbitkan SP4 (Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan) untuk kepentingan kepastian hukum.

**VI. PENUTUP**

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara para saksi dan barang bukti disimpulkan bahwa terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 a.n pelapor Sdr SIMON WANGDRA dan terlapor HERU ARTANS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi polri.

.

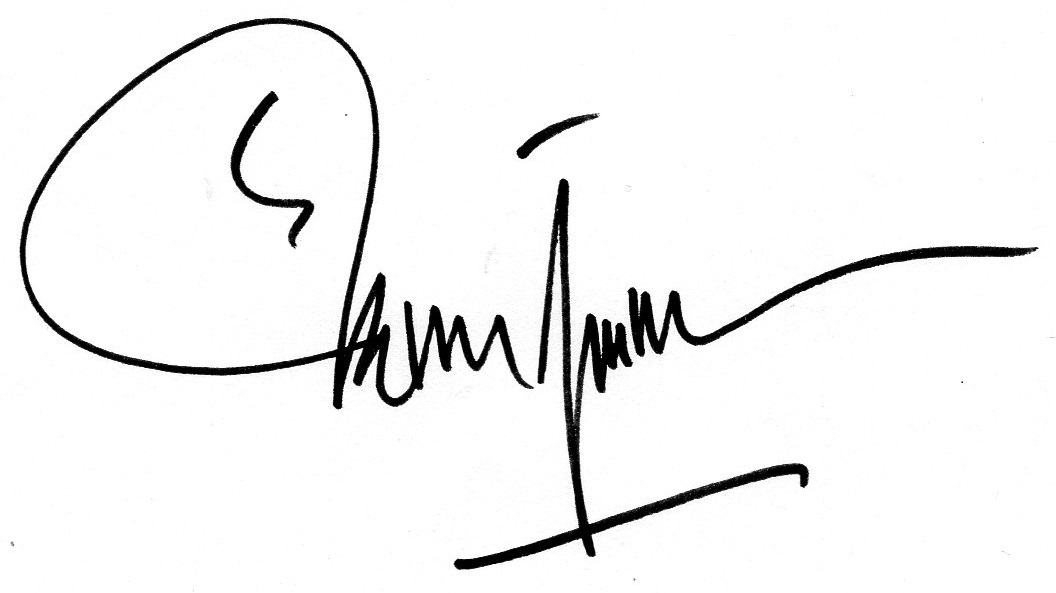
2. Saran.

Memperhatikan fakta bahwa dari hasil audit investigasi tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Sulsel dalam menangani perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/172/IX/2018/PMJ/Ditreskrimsus tanggal 14 September 2018 a.n. Pelapor SIMON SIMARE MARE, maka direkomendasikan audit investigasi dihentikan oleh Rowabprof Divpropam Polri dan segera menerbitkan SP4 (Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan) untuk kepentingan kepstian hukum.

Demikian Laporan Hasil Audit Investigasi ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2021

**YANG MELAPORKAN**



**SUGENG KUNCORO, S.H.**

**AKBP NRP 67060694**